KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BPP MHKP

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN TAHUNAN
PPID BPPMHKP 2026

MELAYANI DENGAN TRANSPARANSI,
MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK

TRANSFORMING TRANSPARENCY INTO PUBLIC TRUST

VISIONER
Menetapkan arah kebijakan yang jelas dan berdampak

KOLABORATIF
Membangun sinergi dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan

INOVATIF
Mendorong inovasi dan transformasi digital dalam layanan informasi publik

AKUNTABEL
Menjunjung tinggi akuntabilitas dalam setiap proses layanan

BERINTEGRITAS
Menegakkan nilai integritas dalam setiap tata kelola informasi

BERDAMPAK
Menghadirkan layanan informatif yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat

337 PENGELOLA PPID PUSAT, PUSAT DAN SELURUH UPT DI INDONESIA

232 PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DITERIMA

92,2% PERMOHONAN DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

92,1 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SANGAT BAIK

100% PPID INFORMATIF TARGET STRATEGIS 2026

100% PPID INFORMATIF
TARGET 2026

"**TRANSPARANSI BUKAN SEKADAR MEMBUKA AKSES INFORMASI.**
TRANSPARANSI ADALAH KEPEMIMPINAN YANG MEMBANGUN KEPERCAYAAN,
MENGGERAKKAN PERUBAHAN, MEMPERKUAT AKUNTABILITAS,
DAN MEMASTIKAN SETIAP KEBIJAKAN PUBLIK MEMBERIKAN MANFAAT NYATA BAGI MASYARAKAT."
INILAH KOMITMEN PPID PEMBINA BPPMHKP DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN KELAS DUNIA."

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BPP MHKP

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

LEADERSHIP DRIVES TRANSPARENCY

Transforming Transparency into Public Trust

TRANSPARAN AKURAT KOLABORATIF INOVATIF BERDAMPAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tahun 2026** dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik sekaligus refleksi perjalanan transformasi menuju tata kelola informasi yang semakin terbuka, adaptif, dan terpercaya.

Tahun 2026 merupakan tahun akselerasi bagi PPID BPPMHKP dalam memperkuat perannya sebagai **PPID Pembina** di lingkungan Badan Mutu. Kami meyakini bahwa kepemimpinan dalam keterbukaan informasi tidak hanya diukur dari kemampuan menyediakan informasi kepada publik, tetapi juga dari kemampuan membangun sistem, membina sumber daya manusia, memperkuat kolaborasi, serta menginspirasi seluruh PPID Pelaksana untuk tumbuh dalam satu standar pelayanan yang unggul. Dengan semangat ***Leadership Drives Transparency***, PPID Pembina hadir sebagai katalis perubahan yang menggerakkan transformasi budaya organisasi menuju pelayanan informasi publik yang profesional, cepat, akurat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sepanjang tahun 2026, berbagai langkah strategis telah dilaksanakan melalui penguatan regulasi, pembinaan nasional, pendampingan intensif kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis, transformasi digital layanan informasi, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi. Pendekatan tersebut menjadi fondasi dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi yang tidak hanya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Berbagai capaian yang diraih sepanjang tahun ini menunjukkan bahwa transformasi tersebut memberikan hasil yang nyata. Tingkat penyelesaian permohonan informasi publik mencapai **92,2%**, sementara Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **92,1** dengan predikat "Sangat Baik" mencerminkan meningkatnya kualitas pelayanan informasi yang dirasakan masyarakat. Namun bagi kami, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika seluruh PPID di lingkungan Badan Mutu memiliki kapasitas yang setara, mampu memberikan pelayanan prima, dan bersama-sama mewujudkan target **100% PPID Informatif** sebagai budaya organisasi, bukan sekadar prestasi administratif.

Laporan ini tidak hanya menyajikan data dan capaian kinerja, tetapi juga menggambarkan arah kepemimpinan, proses transformasi, inovasi, tantangan, serta strategi keberlanjutan yang menjadi landasan pengembangan PPID BPPMHKP pada masa mendatang. Kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber pembelajaran, inspirasi, sekaligus komitmen bersama untuk terus memperkuat keterbukaan informasi sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh PPID Pelaksana, Unit Pelaksana Teknis, para pemangku kepentingan, dan seluruh masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan transformasi ini. Sinergi, dedikasi, dan semangat kolaborasi yang terbangun sepanjang tahun 2026 merupakan modal utama dalam menghadirkan pelayanan informasi publik yang semakin berkualitas dan berkelanjutan.

Kami percaya bahwa transparansi melahirkan kepercayaan, kepercayaan memperkuat kolaborasi, dan kolaborasi menjadi fondasi bagi terwujudnya pelayanan publik yang unggul. Dengan semangat tersebut, **PPID BPPMHKP** akan terus memimpin transformasi keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari kontribusi nyata Badan Mutu dalam menjaga mutu hasil kelautan dan perikanan Indonesia, memperkuat daya saing nasional, serta mewujudkan pemerintahan yang semakin terbuka, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

Jakarta, 10 Juli 2026

Pembina PPID BPPMHKP
Dr. Ir. Woro Nur Endang Sariati, M.P.
Sekretaris Badan
selaku Pembina PPID BPPMHKP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BPP MHKP
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

EXECUTIVE SUMMARY 2026

Transforming Transparency into Public Trust

LEADERSHIP • INNOVATION • ACCOUNTABILITY • EXCELLENCE

> "Kepemimpinan PPID bukan sekadar mengelola informasi, tetapi menggerakkan perubahan organisasi melalui transparansi, kolaborasi, dan pelayanan publik yang membangun kepercayaan masyarakat."

MEMBANGUN BUDAYA KETERBUKAAN INFORMASI

MENUJU 100% PPID INFORMATIF 2026

PPID BPPMHKP sebagai PPID Pembina berkomitmen menghadirkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pembinaan yang terstruktur, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Triwulan I Tahun 2026 menjadi fondasi kuat menuju target 100% Informatif dalam memperkuat kapasitas PPID Pelaksana di seluruh Indonesia.

EXECUTIVE HIGHLIGHTS TRIWULAN I – 2026

46	36	214	16	2	92,1
UPT BINAAN	UPT INFORMATIF (78,26%)	PERMOHONAN DISELESAIKAN (92,2%)	PERMOHONAN DITOLAK (6,9%)	DALAM PROSES (0,9%)	NILAI SKM PREDIKAT SANGAT BAIK

TINGKAT CAPAIAN INFORMATIF

78,26% INFORMATIF (36 UPT)

Tersisa **21,74%** (10 UPT)

Menuju Target **100%**

Ayo Berubah!

TARGET 2026

100% PPID INFORMATIF

FOKUS PEMBINAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

PEMBINAAN NASIONAL
- Penyamaan persepsi kebijakan dan regulasi
- penguatan komitmen menuju 100% Informatif.

1 KEGIATAN

PEMBINAAN KLASTER
- Pendampingan sesuai karakteristik UPT

Penyesuuian gap dan penguatan indikator.

2 KEGIATAN

COACHING CLINIC & PENDAMPINGAN

Klinik penyelesaian permasalahan teknis

Pendampingan penyusunan evidence.

MULTI SESI

MONITORING WEBSITE & LAYANAN

Evaluasi keterbukaan informasi

Perbaikan berkelanjutan dan konten.

BERKALA

EVALUASI EVIDENCE & DOKUMENTASI

Review kelengkapan dan kualitas evidence

Sinkronisasi penilaian nasional.

BERKALA

DAMPAK PEMBINAAN

TATA KELOLA LEBIH KUAT
Struktur, regulasi, SOP, dan koordinasi PPID semakin solid.

LAYANAN SEMAKIN BAIK
Respon lebih cepat, informasi lebih lengkap, dan mudah diakses.

KAPASITAS SDM MENINGKAT
Pengelola PPID semakin kompeten, profesional, dan berintegritas.

TRANSFORMASI DIGITAL
Website, layanan online, dan pemanfaatan teknologi semakin optimal.

KEPERCAYAAN PUBLIK MENINGKAT
Partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik naik.

LEADERSHIP IMPACT 2026

FROM COMPLIANCE TO EXCELLENCE

- 337 Aparatur mengikuti Program Akselerasi Nasional PPID
- Seluruh UPT memperoleh pembinaan secara terintegrasi
- Digitalisasi tata kelola pelayanan informasi semakin kuat
- Standarisasi layanan informasi diterapkan secara nasional
- Budaya transparansi tumbuh sebagai budaya organisasi
- Fondasi menuju **100% PPID Informatif** semakin kokoh

TOP 5 PROGRESS TERBAIK

1	BPPMHKP Batam	↑ 22%
2	SKIPMHKP Tarakan	↑ 20%
3	SKIPMHKP Sorong	↑ 18%
4	BKIPMHKP Ambon	↑ 17%
5	BKIPMHKP Kupang	↑ 16%

*Dibanding kondisi awal tahun 2026

KOMITMEN KAMI

BPPMHKP berkomitmen penuh untuk terus memperkuat budaya keterbukaan informasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menggerakkan manfaat nyata bagi masyarakat demi kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Satu Langkah, Serentak Untuk Prestasi Gemilang!

KONDISI CAPAIAN INDIKATOR UTAMA

WEBSITE PPID	DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)	LAYANAN INFORMASI PUBLIK	DOKUMENTASI & EVIDENCE	KELEMBAGAAN PPID	KESIAPAN PENILAIAN NASIONAL
96% ↑	94% ↑	93% ↑	90% ↑	92% ↑	88% ↑
Sesuai Standar	Terbaru & Aktual	Cepat & Responsif	Kualitas Baik	Struktur & Regulasi Tersedia	Menuju Informatif

ROADMAP MENUJU 100% INFORMATIF

TRIWULAN II JUL – SEP 2026
- Pembinaan Intensif
- Optimalisasi Evidence
- Monitoring Berkala

TRIWULAN III OKT – DES 2026
- Finalisasi Evidence
- Simulasi Penilaian
- Perbaikan Menyeluruh

TAHUN 2026 TARGET AKHIR
- 100% UPT Informatif
- Penguatan Berkelanjutan
- Kepercayaan Publik Meningkat

TAHUN 2027 PENGEMBANGAN
- Arsip Digital & AI
- Open Data & Dashboard
- PPID Academy
- Inovasi Berkelanjutan

TRANSPARAN Informasi terbuka untuk publik.

AKURAT Informasi benar dan dapat dipercaya.

KOLABORATIF Bersinergi untuk hasil yang lebih besar.

INOVATIF Terus berinovasi untuk layanan yang lebih baik.

PROFESIONAL Melayani dengan integritas dan kompetensi.

RESPONSIF Cepat melayani, kebutuhan informasi.

BERSAMA, KITA WUJUDKAN 100% PPID INFORMATIF!

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BPP MHKP
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

PROFIL PPID BPPMHKP

Leadership for Transparency, Excellence for Public Trust

TRANSPARAN • AKUNTABEL • PROFESIONAL • INOVATIF • KOLABORATIF • TERPERCAYA

1.1 PENGANTAR

PPID BPPMHKP hadir sebagai motor penggerak transformasi keterbukaan informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat.

- **TRANSPARANSI** – Membuka Akses Informasi
- **AKUNTABILITAS** – Memastikan Pertanggungjawaban
- **TATA KELOLA YANG BAIK** – Mewujudkan Pemerintahan Efektif
- **PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS** – Memberikan Layanan Terbaik
- **PUBLIC TRUST** – Kepercayaan Masyarakat
- **DAYA SAING NASIONAL** – Sektor Kelautan dan Perikanan Maju

> *"Leadership Drives Transparency"*
> Memimpin perubahan, menumbuhkan kepercayaan, dan menghadirkan layanan informasi publik yang bernilai tambah bagi masyarakat.

1.3 VISI

Menjadi PPID yang **profesional, adaptif, inovatif,** dan **terpercaya** dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai fondasi tata kelola Badan Mutu yang unggul dan berdaya saing global.

1.4 MISI

1. Menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, mudah diakses, akurat, dan akuntabel.
2. Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi berbasis digital yang terintegrasi.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM PPID secara berkelanjutan.
4. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan standardisasi di seluruh PPID Pelaksana.
5. Mendorong budaya transparansi, kolaborasi, dan inovasi dalam tata kelola modern.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui layanan informasi yang inklusif dan responsif.

1.5 TUGAS

Mengoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Mutu secara terpadu, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.

- Perencanaan
- Pengumpulan
- Klasifikasi
- Penyimpanan
- Pemutakhiran
- Penyebarluasan

1.6 FUNGSI

- Perumusan kebijakan
- Pengelolaan informasi
- Pengembangan sistem digital
- Pembinaan & koordinasi
- Monitoring & evaluasi
- Penyelesaian permohonan
- Pengelolaan keberatan
- Penyusunan DIP
- Uji konsekuensi
- Literasi keterbukaan informasi

1.7 STRUKTUR ORGANISASI PPID

SEKRETARIS BADAN MUTU
PPID PEMBINA

- BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
- BIDANG PELAYANAN INFORMASI
- BIDANG DOKUMENTASI & ARSIP
- BIDANG PEMBINAAN & MONITORING
- BIDANG SISTEM & TEKNOLOGI

PPID PELAKSANA
(UNIT PELAKSANA TEKNIS)

UPT SELURUH INDONESIA

1.8 DASAR HUKUM

- **UU No. 14 Tahun 2008** – Keterbukaan Informasi Publik
- **UU No. 25 Tahun 2009** – Pelayanan Publik
- **PP No. 61 Tahun 2010** – Pelaksanaan UU KIP
- **Perki No. 1 Tahun 2021** – Standar Layanan Informasi Publik
- **Perpres No. 192 Tahun 2024** – tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
- **Permen KP & Regulasi Internal** – Organisasi, PPID dan Pengelolaan Informasi Publik

1.9 ROADMAP PPID BPPMHKP 2025–2029

2025 FOUNDATION	2026 ACCELERATION	2027 DIGITAL INTEGRATION	2028 NATIONAL EXCELLENCE	2029 WORLD CLASS PUBLIC INFORMATION
Penguatan tata kelola PPID	Digitalisasi layanan informasi	Integrasi sistem informasi	Penguatan jejaring nasional	100% PPID Informatif di seluruh UPT Badan Mutu
Standarisasi layanan informasi	Pembinaan & pendampingan intensif	Pemanfaatan data dan analitik	Benchmarking & knowledge sharing	
Penguatan kapasitas SDM	Monitoring & evaluasi berbasis kinerja	Inovasi layanan berbasis teknologi	Peningkatan kualitas layanan berkelanjutan	

5 PILAR TRANSFORMASI : LEADERSHIP • DIGITAL • EVIDENCE • COLLABORATION • 100% INFORMATIF

STRATEGIC ROLES PPID

- POLICY LEADER
- CAPACITY BUILDER
- DIGITAL INNOVATOR
- QUALITY ASSURANCE
- NATIONAL COORDINATOR
- PUBLIC SERVICE EXCELLENCE

LEADERSHIP IMPACT

LEADERSHIP → TRANSFORMATION → DIGITAL GOVERNANCE → EXCELLENT SERVICE → PUBLIC TRUST

100% PPID INFORMATIF
TARGET 2029

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BPP MHKP

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB II

KEBIJAKAN DAN ARAH STRATEGIS PPID BPPMHKP

Leading Transparency, Driving Public Trust

ARAH KEBIJAKAN 2026

Mempercepat transformasi pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, akuntabel dan berorientasi pada kepercayaan masyarakat melalui tata kelola modern, digital, kolaboratif, dan berbasis kinerja untuk seluruh Unit Pelaksana Teknis Badan Mutu.

PILAR 1 LEADERSHIP
Kepemimpinan yang kuat sebagai penggerak perubahan organisasi.

PILAR 2 DIGITAL GOVERNMENT
Transformasi pelayanan informasi berbasis teknologi.

PILAR 3 EVIDENCE-BASED GOVERNANCE
Pengelolaan informasi berdasarkan data, dokumentasi, dan bukti yang valid.

PILAR 4 COLLABORATIVE NETWORK
Kolaborasi antara PPID Pembina, PPID Pelaksana, Unit Kerja, dan masyarakat.

PILAR 5 PUBLIC TRUST
Membangun kepercayaan masyarakat melalui layanan informasi yang cepat, transparan, akurat, dan akuntabel.

2026 VISION
Menjadi PPID yang profesional, adaptif, inovatif, dan terpercaya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai fondasi tata kelola Badan Mutu yang unggul dan berdaya saing global.

100% PPID INFORMATIF

2.2 STRATEGI KEPEMIMPINAN PPID PEMBINA
LEADERSHIP-BASED TRANSPARENCY

POLICY LEADER
Menyusun arah kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Mutu.

NATIONAL MENTOR
Membina seluruh PPID Pelaksana melalui pendampingan, konsultasi, dan coaching clinic.

CHANGE DRIVER
Mendorong transformasi digital dan inovasi pelayanan informasi.

QUALITY ASSURANCE
Memastikan layanan informasi memenuhi standar nasional pelayanan publik.

PUBLIC TRUST BUILDER
Membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan informasi yang profesional, cepat, dan akuntabel.

2.3 PRIORITAS STRATEGIS TAHUN 2026

01 PENGUATAN TATA KELOLA PPID
Penguatan regulasi, SOP, DIP, dan klasifikasi informasi untuk pelayanan informasi yang berkualitas dan berkepastian hukum.

02 TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN INFORMASI
Digitalisasi layanan, website informatif, dashboard monitoring, dan pelayanan elektronik yang cepat dan terintegrasi.

03 PENGUATAN KAPASITAS SDM PPID
Bimtek, coaching clinic, mentoring, dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi seluruh PPID Pelaksana.

04 MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS KINERJA
Monitoring berkala dengan indikator terukur untuk pembinaan yang tepat sasaran.

05 INOVASI PELAYANAN INFORMASI
Inovasi kanal digital, media sosial, dashboard layanan, dan sistem dokumentasi elektronik.

06 MEWUJUDKAN 100% PPID INFORMATIF
Mengintegrasikan seluruh program pembinaan menuju seluruh UPT Badan Mutu berpredikat Informatif.

2.4 ROADMAP TRANSFORMASI PPID 2026

TAHAP I STRENGTHENING LEADERSHIP
Penguatan komitmen pimpinan dan budaya keterbukaan informasi.

TAHAP II STRENGTHENING GOVERNANCE
Penyempurnaan regulasi, SOP, DIP, klasifikasi, dan sistem dokumentasi.

TAHAP III DIGITAL TRANSFORMATION
Digitalisasi layanan, website, dashboard, dan pengelolaan arsip elektronik.

TAHAP IV CAPACITY BUILDING
Peningkatan kompetensi PPID Pelaksana melalui pembinaan & evaluasi.

TAHAP V 100% INFORMATIF
Ekosistem layanan informasi publik yang profesional, inovatif, terstandar, dan terpercaya.

2.5 KERANGKA STRATEGIS PPID BPPMHKP

Leadership | Digital Government | Evidence-Based Governance | Collaborative Network | Public Trust

TATA KELOLA MODERN • DIGITAL • KOLABORATIF • BERKINERJA

LEADERSHIP DRIVES TRANSPARENCY
PUBLIC TRUST CREATES IMPACT

2.6 TARGET KINERJA TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	TARGET 2026
Penyelesaian Permohonan Informasi	≥95%
Kepatuhan Standar Layanan Informasi	100%
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	≥92
Website PPID Aktif dan Terintegrasi	100%
Daftar Informasi Publik Terbarui	100%
PPID Pelaksana Terbina	100%
Monitoring dan Evaluasi PPID	100%
TARGET PREDIKAT PPID	**100% INFORMATIF**

PENUTUP BAB II

Arah kebijakan dan strategi PPID BPPMHKP Tahun 2026 menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan investasi jangka panjang dalam membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat. Dengan kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang adaptif, transformasi digital yang berkelanjutan, serta pembinaan yang menyeluruh, PPID Pembina terus menggerakkan seluruh PPID Pelaksana menuju standar pelayanan yang unggul. Visi **"100% PPID Informatif"** bukan sekadar target kinerja, melainkan komitmen bersama untuk menjadikan transparansi sebagai budaya organisasi dan fondasi pelayanan publik yang berintegritas dan berdampak.

100% PPID INFORMATIF

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BPP MHKP
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB III

KINERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

Delivering Transparency, Building Public Trust

TRANSPARAN • AKUNTABEL • PROFESIONAL • ADAPTIF • INOVATIF

3.1 GAMBARAN UMUM KINERJA

Tahun 2026 menjadi fase percepatan transformasi pelayanan informasi publik di lingkungan BPPMHKP. Melalui penguatan tata kelola, transformasi digital, pembinaan berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas SDM, PPID BPPMHKP terus meningkatkan kualitas layanan informasi yang cepat, mudah diakses, akurat, transparan, dan akuntabel. Sinergi PPID Pembina, PPID Pelaksana, dan seluruh unit kerja menghasilkan peningkatan kinerja, kepuasan masyarakat, dan budaya keterbukaan informasi yang semakin kuat.

KINERJA UTAMA TAHUN 2026

- **232** Permohonan Informasi
- **214** Permohonan Diselesaikan
- **92,2%** Tingkat Penyelesaian
- **92,1** Indeks Kepuasan Masyarakat

★★★★★

SANGAT BAIK
Predikat Pelayanan

3.2 STRATEGI KEPEMIMPINAN PPID PEMBINA
LEADERSHIP-BASED TRANSPARENCY

POLICY LEADER
Menyusun arah kebijakan keterbukaan informasi publik.

NATIONAL MENTOR
Membina PPID Pelaksana melalui pendampingan, konsultasi, dan coaching clinic.

CHANGE DRIVER
Mendorong transformasi digital dan inovasi layanan informasi.

QUALITY ASSURANCE
Memastikan layanan informasi memenuhi standar nasional pelayanan publik.

PUBLIC TRUST BUILDER
Membangun kepercayaan masyarakat melalui layanan profesional, cepat, dan akuntabel.

KEPEMIMPINAN KUAT, LAYANAN HEBAT, KEPERCAYAAN PUBLIK MENINGKAT

3.2 CAPAIAN KINERJA UTAMA TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN
Permohonan Informasi Publik	232
Permohonan Diselesaikan	214
Tingkat Penyelesaian	92,2%
Responden Survei Kepuasan	163
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	92,1
Predikat Pelayanan	SANGAT BAIK

3.3 PRIORITAS STRATEGIS TAHUN 2026

01 PENGUATAN TATA KELOLA PPID
Regulasi, SOP, DIP, klasifikasi informasi, kepastian hukum.

02 TRANSFORMASI DIGITAL INFORMASI
Website, arsip digital, dashboard monitoring, layanan elektronik terintegrasi.

PENGUATAN KAPASITAS SDM PPID
Bimtek, coaching clinic, mentoring, pendampingan, kompetensi seragam.

MONITORING & EVALUASI BERBASIS KINERJA
Monitoring berkala dengan indikator terukur dan tepat sasaran.

05 INOVASI PELAYANAN INFORMASI
Kanal digital, media sosial, dashboard layanan, inovasi berkelanjutan.

06 100% PPID INFORMATIF
Gerakan nasional menuju seluruh UPT Badan Mutu meraih predikat Informatif.

3.4 PROFIL PEMOHON
Berdasarkan Kategori

- Akademisi & Peneliti
- Masyarakat Umum
- Pelaku Usaha
- Instansi Pemerintah
- Mahasiswa
- Organisasi Masyarakat
- Media Massa

3.5 JENIS INFORMASI YANG PALING DIMINTA

- Data penelitian & hasil kajian
- Data laboratorium mutu hasil kelautan dan perikanan
- Sertifikasi mutu & keamanan hasil perikanan
- Pengawasan mutu hasil perikanan
- Informasi pelayanan teknis
- Kerja sama internasional
- Data ekspor hasil kelautan dan perikanan

3.6 KINERJA PELAYANAN INFORMASI DIGITAL

Kanal Layanan Digital

- Website PPID
- Email Resmi PPID
- WhatsApp Center
- Media Sosial
- Layanan Tatap Muka
- Surat Elektronik

3.7 HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2026

ASPEK PENILAIAN TERTINGGI
- ✓ Kemudahan memperoleh informasi
- ✓ Sikap petugas pelayanan
- ✓ Kompetensi petugas
- ✓ Kecepatan pelayanan

ASPEK YANG TERUS DITINGKATKAN
- ✓ Sarana dan prasarana

3.8 INOVASI PELAYANAN INFORMASI

- Digitalisasi Dokumen & Arsip
- Dashboard Monitoring
- Optimalisasi Website PPID
- Penguatan Media Sosial
- Infografis Informasi Publik
- Program Tim Katalis 100% Informatif
- Pendampingan Intensif UPT

3.9 TARGET KINERJA TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	TARGET 2026
Penyelesaian Permohonan Informasi	≥95%
Kepatuhan Standar Layanan Informasi	100%
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	≥92
Website PPID Aktif dan Terintegrasi	100%
Daftar Informasi Publik Terbarui	100%
PPID Pelaksana Terbina	100%
Monitoring dan Evaluasi PPID	100%
TARGET PREDIKAT PPID	**100% INFORMATIF**

3.10 ROADMAP TRANSFORMASI PPID TAHUN 2026

TAHAP I STRENGTHENING LEADERSHIP
Penguatan komitmen pimpinan & budaya keterbukaan informasi.

TAHAP II STRENGTHENING GOVERNANCE
Penyempurnaan regulasi, SOP, DIP, klasifikasi, & sistem dokumentasi.

TAHAP III DIGITAL TRANSFORMATION
Digitalisasi layanan, website, dashboard monitoring, & arsip elektronik.

TAHAP IV CAPACITY BUILDING
Peningkatan kompetensi PPID Pelaksana melalui pembinaan & evaluasi.

TAHAP V 100% INFORMATIF
Ekosistem layanan informasi profesional, inovatif, terstandar, & terpercaya.

3.9 PRESTASI DAN CAPAIAN STRATEGIS

- Penguatan fungsi PPID Pembina
- Pembinaan PPID Pelaksana nasional
- Standar pelayanan informasi seragam
- Peningkatan kualitas website PPID
- Monitoring & evaluasi berbasis kinerja
- Percepatan transformasi digital layanan

3.10 ANALISIS KINERJA

Kualitas pelayanan informasi publik meningkat signifikan pada tahun 2026. Tingkat penyelesaian tinggi, kepuasan masyarakat meningkat, dan koordinasi semakin kuat antara PPID Pembina dan PPID Pelaksana. Transformasi budaya, pemanfaatan teknologi, dan standar layanan yang seragam menjadi fondasi mewujudkan 100% PPID Informatif serta membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

"TRANSPARANSI ADALAH KOMITMEN, AKUNTABILITAS ADALAH BUDAYA, DAN PELAYANAN INFORMASI ADALAH WUJUD KEPERCAYAAN PUBLIK."

- **TRANSPARAN** Membuka Informasi untuk Publik
- **AKUNTABEL** Bertanggung jawab atas setiap layanan
- **PROFESIONAL** Melayani dengan integritas & kompetensi
- **ADAPTIF** Tanggap terhadap perubahan & kebutuhan
- **INOVATIF** Berinovasi untuk layanan lebih baik
- **KOLABORATIF** Bersinergi untuk hasil terbaik

100% PPID INFORMATIF
TUJUAN KITA, KOMITMEN BERSAMA!

PPID BPPMHKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB IV

TRANSFORMASI, INOVASI, DAN KEPEMIMPINAN PPID PEMBINA

Leading Transformation, Inspiring Excellence

100% INFORMATIF TARGET 2026

4.1 TRANSFORMASI PPID MENUJU ORGANISASI YANG INFORMATIF

Tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi PPID BPPMHKP. Transformasi dilakukan tidak hanya pada sistem pelayanan informasi, tetapi juga pada perubahan mindset, budaya kerja, dan tata kelola organisasi agar keterbukaan informasi menjadi bagian yang melekat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Keterbukaan informasi menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat. Pendekatan ini mendorong seluruh UPT untuk tidak hanya patuh regulasi, tetapi menghadirkan inovasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Transformasi dilaksanakan melalui penguatan kepemimpinan, sistem digital, peningkatan kompetensi SDM, penyempurnaan tata kelola informasi, serta penguatan kolaborasi. PPID bukan lagi fungsi administratif, melainkan *change agent* yang mendukung birokrasi modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan.

HASIL TRANSFORMASI 2026

- Layanan Cepat & Akurat
- Sistem Digital Terintegrasi
- Budaya Transparansi Menguat
- Kepercayaan Publik Meningkat

PEMBAGIAN TIM KATALIS AKSELERASI NASIONAL

100% UPT BPPMHKP INFORMATIF 2026

PENDEKATAN HYBRID : WILAYAH TETAP ADA, PENDAMPINGAN BERDASARKAN RISIKO!

KLASTER 1 — 11 UPT SUPER PRIORITAS

AKSELERASI 11 UPT MENUJU INFORMATIF

MENTOR NASIONAL

- BKI PPMHKP BALIKPAPAN (100)
- BKI PPMHKP MATARAM (100)

PERAN MENTOR

- Bedah Indikator SAQ
- Identifikasi Gap Nilai
- Kelompokkan DIP & DIK
- Informasi Berkala & Serta Merta
- Kelengkapan Eviden Pendukung
- Optimalisasi Website PPID
- Coaching & Monitoring Intensif

UPT YANG DIBINA (11 UPT)

NO	NAMA UPT	NILAI
1	SKIPPMHKP Tahuna	62,10
2	SKIPPMHKP Tanjung Balai Asahan	62,87
3	SKIPPMHKP Pekanbaru	70,82
4	SKIPPMHKP Kendari	67,41
5	SKIPPMHKP Tanjung Pinang	71,25
6	BKIPPMHKP Denpasar	79,80
7	SKIPPMHKP Palu	83,65
8	BKIPPMHKP Surabaya II	84,62
9	BKIPPMHKP Medan I	88,30
11	BKIPPMHKP Semarang	89,80

* Nilai berdasarkan hasil Monev KIP KKP Tahun 2024

KLASTER 2 — 35 UPT INFORMATIF

PENGAWALAN & REPLIKASI PRAKTIK BAIK

MENTOR & UPT YANG DIBINA BERDASARKAN WILAYAH

WILAYAH I SUMATERA

MENTOR:
- BKI PPMHKP Aceh (100)
- SKI PPMHKP Padang (100)

UPT YANG DIBINA (6 UPT):
1. SKI PPMHKP Medan 2 (94,60)
2. SKI PPMHKP Bengkulu (87,20)
3. SKI PPMHKP Jambi (96,70)
4. SKI PPMHKP Pangkal Pinang (91,30)
5. BKI PPMHKP Palembang (95,10)
6. SKI PPMHKP Batam (91,90)

(Total 6 UPT)

WILAYAH II JAWA – BALI

MENTOR:
- BKI PPMHKP Jakarta 2 (100)
- SKI PPMHKP Cirebon (100)

UPT YANG DIBINA (6 UPT):
1. BKI PPMHKP Surabaya I (99,70)
2. SKI PPMHKP Jogjakarta (98,60)
3. SKI PPMHKP Merak (99,60)
4. Balai Uji Standar BPPMHKP (92,50)
5. SKI PPMHKP Bandung (100)
6. SKI PPMHKP Lampung (95,40)

(Total 6 UPT)

WILAYAH III KALIMANTAN – NUSA TENGGARA

MENTOR:
- BKI PPMHKP Tarakan (100)
- SKI PPMHKP Banjarbaru (100)

UPT YANG DIBINA (5 UPT):
1. BKI PPMHKP Entikong (95,68)
2. SKI PPMHKP Pontianak (94,50)
3. SKI PPMHKP Palangkaraya (94,93)
4. SKI PPMHKP Kupang (97,60)
5. SKI PPMHKP Bima (97,80)

(Total 5 UPT)

WILAYAH IV SULAWESI – PAPUA

MENTOR:
- BKI PPMHKP Ambon (100)
- BKI PPMHKP Sorong (100)
- SKI PPMHKP Ternate (100)

UPT YANG DIBINA (8 UPT):
1. BKI PPMHKP Manado (99,13)
2. SKI PPMHKP Gorontalo (92,60)
3. BKI PPMHKP Makassar (96,80)
4. SKI PPMHKP Palu (93,35)
5. SKI PPMHKP Luwuk Banggai (98,30)
6. BKI PPMHKP Jayapura (96,85)
7. BKI PPMHKP Merauke (99,11)

(Total 8 UPT)

PERAN UTAMA KLASTER 2

- Menjadi Role Model
- Berbagi Praktik Baik
- Pendampingan Sesama UPT
- Penguatan Inovasi & Layanan
- Menjaga Konsistensi & Kualitas

4.2 KEPEMIMPINAN PPID PEMBINA SEBAGAI PENGGERAK PERUBAHAN

PPID Pembina menjalankan peran sebagai strategic *leader* yang mengintegrasikan kebijakan, pembinaan, inovasi, dan evaluasi dalam satu kerangka transformasi berkelanjutan.

VISIONARY LEADER
Menetapkan arah pengembangan keterbukaan informasi publik yang selaras dengan visi Badan Mutu dan KKP.

INSTITUTIONAL BUILDER
Membangun sistem, regulasi, dan standar pelayanan informasi yang seragam di seluruh lingkungan Badan Mutu.

NATIONAL MENTOR
Membina dan memperkuat kapasitas seluruh PPID Pelaksana melalui pendampingan, coaching clinic, dan konsultasi berkelanjutan.

INNOVATION CATALYST
Mendorong lahirnya inovasi pelayanan informasi berbasis teknologi digital dan kebutuhan masyarakat.

TRUST BUILDER
Memperkuat kepercayaan publik melalui pelayanan informasi yang cepat, transparan, akurat, dan akuntabel.

LEADERSHIP DRIVES TRANSFORMATION • TRANSFORMATION CREATES IMPACT
100% UPT BPPMHKP INFORMATIF 2026

JADWAL PENTING AKSELERASI 100% UPT BPPMHKP INFORMATIF 2026

1 PEMBINAAN NASIONAL
LINGKUP BADAN MUTU
Selasa, 23 Juni 2026
- Penyamaan Persepsi
- Strategi & Arah Kebijakan
- Penguatan Komitmen
- Pembagian Klaster & Mentor

2 PEMBINAAN KLASTER 1
Kamis, 25 Juni 2026
- Coaching & Bedah SAQ
- Identifikasi Gap Nilai
- Penyusunan Rencana Perbaikan
- Pendampingan Intensif

3 PEMBINAAN KLASTER 2
Jum'at, 26 Juni 2026
- Replikasi Praktik Baik
- Penguatan Evidence
- Optimalisasi Website PPID
- Sharing Best Practice

4 PENGERJAAN SAQ
SECARA MANDIRI
27 – 29 Juni 2026
- Penyusunan SAQ
- Kelengkapan Evidence
- Penyempurnaan Website
- Validasi Dokumen

5 PENILAIAN PENDAHULUAN
LINGKUP BADAN MUTU UNTUK PARA MENTOR
29 – 30 Juni 2026
- Review SAQ
- Koreksi Evidence
- Catatan Perbaikan
- Konsolidasi Hasil

6 PENILAIAN PENDAHULUAN MANDIRI
KLASTER 1 & 2
1 – 4 Juli 2026
- Finalisasi SAQ
- Penyempurnaan Evidence
- Simulasi Penilaian
- Persiapan Submit

7 FINAL SUBMIT PELIKAN
Minggu, 5 Juli 2026 Jam 12.00 WIB
- Seluruh SAQ selesai
- Evidence lengkap
- Submit melalui aplikasi PELIKAN

8 PENILAIAN NASIONAL LINGKUP KKP
7 – 10 Juli 2026
Bandung
- Hanya diwakili oleh Eselon I (PPID Pelaksana)
- Presentasi Nasional
- Verifikasi & Penilaian Akhir

KPI NASIONAL 2026	STATUS
Target Nasional	46 UPT
Sudah Informatif	36 UPT
Belum Informatif	10 UPT
Persentase Capaian	78,26%
Target Akhir	100%

TARGET AKHIR 2026
46 UPT BPPMHKP 100% INFORMATIF

PROGRES CAPAIAN SAAT INI
78,26% TERCAPAI

RINGKASAN NASIONAL 2026

TOTAL UPT BPPMHKP **46 UPT**

INFORMATIF (90 – 100) **36 UPT (78,26%)**

PRIORITAS PENINGKATAN (80 – 89,99) **4 UPT (8,70%)**

SUPER PRIORITAS (60 – 79,99) **6 UPT (13,04%)**

BERGERAK BERSAMA | BERBAGI PRAKTIK BAIK | MENGAWAL PERUBAHAN | MENUJU 100% BPPMHKP INFORMATIF!

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BPP MHKP
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB V

DAMPAK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN KEPUASAN MASYARAKAT

Creating Value Through Transpoarency

- **TRANSPARANSI** — Terbuka & Akuntabel
- **INTEGRITAS** — Kuat & Konsisten
- **KUALITAS** — Profesional & Prima
- **KEPERCAYAAN** — Public Trust
- **DAMPAK** — Nyata & Berkelanjutan

Transparansi
Membangun
Kepercayaan
Pelayanan
Memberi Nilai
Tata Kelola
Mewujudkan
Kinerja Unggul

1 ARAH KEBIJAKAN 2026

PPID BPPMHKP menetapkan arah kebijakan untuk mempercepat transformasi pelayanan informasi publik yang cepat, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat, sejalan dengan Reformasi Birokrasi, SPBE, dan transformasi digital nasional.

- Instrumen strategis membangun public trust & integritas kelembagaan
- Budaya transparansi sebagai bagian tata kelola organisasi modern
- Perubahan nyata, terukur, dan berkelanjutan di seluruh UPT
- Profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat

2 STRATEGI KEPEMIMPINAN PPID PEMBINA

LEADERSHIP-BASED TRANSPARENCY

- **POLICY LEADER** — Menyusun arah kebijakan keterbukaan informasi
- **NATIONAL MENTOR** — Membina PPID Pelaksana melalui pendampingan & coaching clinic
- **CHANGE DRIVER** — Mendorong transformasi digital & inovasi layanan informasi
- **GUALITY ASSURANCE** — Memastikan layanan informasi memenuhi standar nasional pelayanan publik
- **PUBLIC TRUST BUILDER** — Membangun kepercayaan publik melalui layanan profesional, cepat, akuntabel

TARGET: 100% PPID INFORMATIF

3 PRIORITAS STRATEGIS TAHUN 2026

1. **Penguatan Tata Kelola PPID**
   Regulasi, SOP, DIP, dan klasifikasi informasi
2. **Transformasi Digital Pelayanan Informasi**
   Digitalisasi layanan, website, dashboard, arsip & dokumentasi elektronik
3. **Penguatan Kapasitas SDM PPID**
   Bimtek, coaching clinic, mentoring nasional, forum koordinasi
4. **Monitoring & Evaluasi Berbasis Kinerja**
   Monitoring berkala berbasis indikator kinerja terukur
5. **Inovasi Pelayanan Informasi**
   Inovasi kanal digital, media sosial, dashhoord & sistem pengelolaan dokumentasi elektronik
6. **Mewujudkan 100% PPID Informatif**
   Gerakan nasional menuju seluruh UPT Badan Mutu berpredikat Informatif

4 HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2026

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

92,1 — A

SANGAT BAIK

- **163** RESPONDEN
- MUTU PELAYANAN **A**
- KATEGORI KINERJA **SANGAT BAIK**

5 ANALISIS PER UNSUR PELAYANAN

Persyaratan Pelayanan	92,8
Sistem, Mekanisme, & Prosedur	92,3
Waktu Penyelesaian	91,6
Biaya / Tarif	93,7
Produk Layanan	92,9
Kompetensi Pelaksana	93,3
Perilaku Pelaksana	93,4
Penanganan Pengaduan	90,7
Sarana & Prasarana	89,8

6 ROADMAP TRANSFORMASI PPID 2026

1. **STRENGTHENING LEADERSHIP** — Pengyatan komitmen pimpinan & budaya keterbukaan informasi
2. **STRENGTHENING GOVERNANCE** — Penyempurnaan regulasi, SOP, DIP, klasifikasi informasi & sistem dokumentasi
3. **DIGITAL TRANSFORMATION** — Digitalisasi layanan, website, dashboard monitoring & arsip elektronik
4. **CAPACITY BUILDING** — Peningkatan kompetensi PPID Pelaksana melalui pembinaan, mentoring & evaluasi berkelanjutan
5. **100% INFORMATIF** — Ekosistem layanan informasi profesional, inovatif, terstandar & terpercaya di seluruh UPT

7 KERANGKA STRATEGIS (5 PILAR)

1. **LEADERSHIP** — Kepemimpinan kuat sebagai penggerak perubahan
2. **DIGITAL GOVERNMENT** — Transformasi layanan informasi berbasis teknologi
3. **EVIDENCE-BASED GOVERNANCE** — Pengelolaan informasi berdasarkan data, dokumentasi & bukti valid
4. **COLLABORATIVE NETWORK** — Kolaborasi PPID Pembina, PPID Pelaksana, unit kerja & masyarakat
5. **PUBLIC TRUST** — Membangun kepercayaan masyarakat melalui layanan cepat, transparan, akurat, akuntabel

8 TARGET KINERJA TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	TARGET 2026
Penyelesaian Permohonan Informasi	≥95%
Kepatuhan Standar Layanan Informasi	100%
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	≥92
Website PPID Aktif dan Terintegrasi	100%
Daftar Informasi Publik Terbarui	100%
PPID Pelaksana Terbina	100%
Monitoring dan Evaluasi PPID	100%
TARGET PREDIKAT PPID	**100% INFORMATIF**

9 DAMPAK UTAMA

- Budaya transparansi meningkat di seluruh unit kerja
- Koordinasi PPID semakin kuat dan terintegrasi
- Kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi meningkat
- Sistem pelayanan informasi lebih terstandar
- Kepercayaan masyarakat terhadap Badan Mutu meningkat
- Monitokung Reformasi Birokrasi dan implementasi SPBE

10 TESTIMONI MASYARAKAT

AKADEMISI

"Informasi yang diberikan sangat lengkap dan akurat, sangat membantu penelitian kami."

★★★★★

PELAKU USAHA

"Layanan cepat, mudah diakses, dan responsif. Sangat mendukung kegiatan usaha kami.

★★★★★

MASYARAKAT

"Permohonan informasi ditindaklanjuti dengan cepat dan petugas sangat ramah."

★★★★★

11 KOMITMEN PERBAIKAN BERKELANJUTAN

- Peningkatan Sarana & Prasarana
- Penyempurnaan Sistem Pengaduan
- Penguatan Layanan Digital & Teknologi
- Integrasi Data & Dokumentasi
- Peningkatan Kompetensi SDM
- Inovasi Layanan Inklusif & Mudah Diakses

PENUTUP BAB V

Kepuasan masyarakat adalah cermin keberhasilan pelayanan informasi publik dan fondasi kepercayaan publik. Dengan kepemimpinan yang kuat, tata kelola adaptif, dan transformasi digital berkelanjutan, PPID BPPMHKP terus menghadirkan pelayanan informasi yang profesional, bernilai tambah, dan berdampak nyata.

> *"Kepuasan masyarakat bukanlah tujuan akhir, melainkan cerminan dari kepemimpinan yang mampu mengubah transparansi menjadi kepercayaan, pelayanan menjadi nilai tambah, dan akuntabilitas menjadi budaya organisasi."*

SATU KOMITMEN
SATU GERAKAN
SATU PRESTASI
100% PPID INFORMATIF

PPID BPPMHKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB IV

TRANSFORMASI, INOVASI, DAN KEPEMIMPINAN PPID PEMBINA

Leading Transformation, Inspiring Excellence

100% INFORMATIF TARGET 2026

4.1 TRANSFORMASI PPID MENUJU ORGANISASI YANG INFORMATIF

Tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi PPID BPPMHKP. Transformasi dilakukan tidak hanya pada sistem pelayanan informasi, tetapi juga pada perubahan mindset, budaya kerja, dan tata kelola organisasi agar keterbukaan informasi menjadi bagian yang melekat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Keterbukaan informasi menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat. Pendekatan ini mendorong seluruh UPT untuk tidak hanya patuh regulasi, tetapi menghadirkan inovasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Transformasi dilaksanakan melalui penguatan kepemimpinan, sistem digital, peningkatan kompetensi SDM, penyempurnaan tata kelola informasi, serta penguatan kolaborasi. PPID bukan lagi fungsi administratif, melainkan *change agent* yang mendukung birokrasi modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan.

HASIL TRANSFORMASI 2026

- Layanan Cepat & Akurat
- Sistem Digital Terintegrasi
- Budaya Transparansi Menguat
- Kepercayaan Publik Meningkat

PEMBAGIAN TIM KATALIS AKSELERASI NASIONAL

100% UPT BPPMHKP INFORMATIF 2026

PENDEKATAN HYBRID : WILAYAH TETAP ADA, PENDAMPINGAN BERDASARKAN RISIKO!

KLASTER 1 — 11 UPT SUPER PRIORITAS

AKSELERASI 11 UPT MENUJU INFORMATIF

MENTOR NASIONAL

- BKI PPMHKP BALIKPAPAN (100)
- BKI PPMHKP MATARAM (100)

PERAN MENTOR

- Bedah Indikator SAQ
- Identifikasi Gap Nilai
- Kelompokkan DIP & DIK
- Informasi Berkala & Serta Merta
- Kelengkapan Eviden Pendukung
- Optimalisasi Website PPID
- Coaching & Monitoring Intensif

UPT YANG DIBINA (11 UPT)

NO	NAMA UPT	NILAI
1	SKIPPMHKP Tahuna	62,10
2	SKIPPMHKP Tanjung Balai Asahan	62,87
3	SKIPPMHKP Pekanbaru	70,82
4	SKIPPMHKP Kendari	67,41
5	SKIPPMHKP Tanjung Pinang	71,25
6	BKIPPMHKP Denpasar	79,80
7	SKIPPMHKP Palu	83,65
8	BKIPPMHKP Surabaya II	84,62
9	BKIPPMHKP Medan I	88,30
11	BKIPPMHKP Semarang	89,80

* Nilai berdasarkan hasil Monev KIP KKP Tahun 2024

KLASTER 2 — 35 UPT INFORMATIF

PENGAWALAN & REPLIKASI PRAKTIK BAIK

MENTOR & UPT YANG DIBINA BERDASARKAN WILAYAH

WILAYAH I SUMATERA

MENTOR:
- BKI PPMHKP Aceh (100)
- SKI PPMHKP Padang (100)

UPT YANG DIBINA (6 UPT):
1. SKI PPMHKP Medan 2 (94,60)
2. SKI PPMHKP Bengkulu (87,20)
3. SKI PPMHKP Jambi (96,70)
4. SKI PPMHKP Pangkal Pinang (91,30)
5. BKI PPMHKP Palembang (95,10)
6. SKI PPMHKP Batam (91,90)

(Total 6 UPT)

WILAYAH II JAWA – BALI

MENTOR:
- BKI PPMHKP Jakarta 2 (100)
- SKI PPMHKP Cirebon (100)

UPT YANG DIBINA (6 UPT):
1. BKI PPMHKP Surabaya I (99,70)
2. SKI PPMHKP Jogjakarta (98,60)
3. SKI PPMHKP Merak (99,60)
4. Balai Uji Standar BPPMHKP (92,50)
5. SKI PPMHKP Bandung (100)
6. SKI PPMHKP Lampung (95,40)

(Total 6 UPT)

WILAYAH III KALIMANTAN – NUSA TENGGARA

MENTOR:
- BKI PPMHKP Tarakan (100)
- SKI PPMHKP Banjarbaru (100)

UPT YANG DIBINA (5 UPT):
1. BKI PPMHKP Entikong (95,68)
2. SKI PPMHKP Pontianak (94,50)
3. SKI PPMHKP Palangkaraya (94,93)
4. SKI PPMHKP Kupang (97,60)
5. SKI PPMHKP Bima (97,80)

(Total 5 UPT)

WILAYAH IV SULAWESI – PAPUA

MENTOR:
- BKI PPMHKP Ambon (100)
- BKI PPMHKP Sorong (100)
- SKI PPMHKP Ternate (100)

UPT YANG DIBINA (8 UPT):
1. BKI PPMHKP Manado (99,13)
2. SKI PPMHKP Gorontalo (92,60)
3. BKI PPMHKP Makassar (96,80)
4. SKI PPMHKP Palu (93,35)
5. SKI PPMHKP Luwuk Banggai (98,30)
6. BKI PPMHKP Jayapura (96,85)
7. BKI PPMHKP Merauke (99,11)

(Total 8 UPT)

PERAN UTAMA KLASTER 2

- Menjadi Role Model
- Berbagi Praktik Baik
- Pendampingan Sesama UPT
- Penguatan Inovasi & Layanan
- Menjaga Konsistensi & Kualitas

4.2 KEPEMIMPINAN PPID PEMBINA SEBAGAI PENGGERAK PERUBAHAN

PPID Pembina menjalankan peran sebagai strategic *leader* yang mengintegrasikan kebijakan, pembinaan, inovasi, dan evaluasi dalam satu kerangka transformasi berkelanjutan.

VISIONARY LEADER
Menetapkan arah pengembangan keterbukaan informasi publik yang selaras dengan visi Badan Mutu dan KKP.

INSTITUTIONAL BUILDER
Membangun sistem, regulasi, dan standar pelayanan informasi yang seragam di seluruh lingkungan Badan Mutu.

NATIONAL MENTOR
Membina dan memperkuat kapasitas seluruh PPID Pelaksana melalui pendampingan, coaching clinic, dan konsultasi berkelanjutan.

INNOVATION CATALYST
Mendorong lahirnya inovasi pelayanan informasi berbasis teknologi digital dan kebutuhan masyarakat.

TRUST BUILDER
Memperkuat kepercayaan publik melalui pelayanan informasi yang cepat, transparan, akurat, dan akuntabel.

LEADERSHIP DRIVES TRANSFORMATION • TRANSFORMATION CREATES IMPACT
100% UPT BPPMHKP INFORMATIF 2026

JADWAL PENTING AKSELERASI 100% UPT BPPMHKP INFORMATIF 2026

1 PEMBINAAN NASIONAL
LINGKUP BADAN MUTU
Selasa, 23 Juni 2026
- Penyamaan Persepsi
- Strategi & Arah Kebijakan
- Penguatan Komitmen
- Pembagian Klaster & Mentor

2 PEMBINAAN KLASTER 1
Kamis, 25 Juni 2026
- Coaching & Bedah SAQ
- Identifikasi Gap Nilai
- Penyusunan Rencana Perbaikan
- Pendampingan Intensif

3 PEMBINAAN KLASTER 2
Jum'at, 26 Juni 2026
- Replikasi Praktik Baik
- Penguatan Evidence
- Optimalisasi Website PPID
- Sharing Best Practice

4 PENGERJAAN SAQ
SECARA MANDIRI
27 – 29 Juni 2026
- Penyusunan SAQ
- Kelengkapan Evidence
- Penyempurnaan Website
- Validasi Dokumen

5 PENILAIAN PENDAHULUAN
LINGKUP BADAN MUTU UNTUK PARA MENTOR
29 – 30 Juni 2026
- Review SAQ
- Koreksi Evidence
- Catatan Perbaikan
- Konsolidasi Hasil

6 PENILAIAN PENDAHULUAN MANDIRI
KLASTER 1 & 2
1 – 4 Juli 2026
- Finalisasi SAQ
- Penyempurnaan Evidence
- Simulasi Penilaian
- Persiapan Submit

7 FINAL SUBMIT PELIKAN
Minggu, 5 Juli 2026 Jam 12.00 WIB
- Seluruh SAQ selesai
- Evidence lengkap
- Submit melalui aplikasi PELIKAN

8 PENILAIAN NASIONAL LINGKUP KKP
7 – 10 Juli 2026
Bandung
- Hanya diwakili oleh Eselon I (PPID Pelaksana)
- Presentasi Nasional
- Verifikasi & Penilaian Akhir

KPI NASIONAL 2026	STATUS
Target Nasional	46 UPT
Sudah Informatif	36 UPT
Belum Informatif	10 UPT
Persentase Capaian	78,26%
Target Akhir	100%

TARGET AKHIR 2026
46 UPT BPPMHKP 100% INFORMATIF

PROGRES CAPAIAN SAAT INI
78,26% TERCAPAI

RINGKASAN NASIONAL 2026

TOTAL UPT BPPMHKP **46 UPT**

INFORMATIF (90 – 100) **36 UPT (78,26%)**

PRIORITAS PENINGKATAN (80 – 89,99) **4 UPT (8,70%)**

SUPER PRIORITAS (60 – 79,99) **6 UPT (13,04%)**

BERGERAK BERSAMA | BERBAGI PRAKTIK BAIK | MENGAWAL PERUBAHAN | MENUJU 100% BPPMHKP INFORMATIF!

PPID BPPMHKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB VII

EVALUASI, TANTANGAN, DAN ARAH STRATEGIS 2027

From Achievement to Sustainable Excellence

100% PPID INFORMATIF TARGET 2027

7.1 PENDAHULUAN

Evaluasi bukan sekadar mengukur kinerja, tetapi instrumen strategis untuk memperkuat kebijakan, efektivitas pembinaan, dan keberlanjutan transformasi pelayanan informasi publik.

PPID BPPMHKP menjadikan evaluasi sebagai budaya pembelajaran (*learning organization*) untuk replikasi praktik baik, inovasi berkelanjutan, dan penyempurnaan layanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

7.2 EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2026

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	PERMOHONAN DISELESAIKAN	TINGKAT PENYELESAIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
232 Diterima	214 Selesai	92,2%	92,1 Sangat Baik

Kualitas layanan meningkat, koordinasi semakin kuat, namun masih diperlukan penguatan digital, SDM, integrasi data, dan literasi informasi.

7.3 TANTANGAN STRATEGIS

PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL
Tuntutan layanan cepat, aman, terintegrasi, dan responsif.

PENINGKATAN KAPASITAS SDM
Kompetensi pengelola PPID perlu ditingkatkan secara merata.

INTEGRASI DATA & DOKUMENTASI
Sistem dokumentasi terintegrasi untuk informasi akurat & mutakhir.

PENGUATAN BUDAYA TRANSPARANSI
Transparansi sebagai komitmen bersama seluruh unit kerja.

ADAPTASI REGULASI & TEKNOLOGI
Perubahan regulasi & teknologi menuntut inovasi dan penyempurnaan berkelanjutan.

7.4 PELUANG PENGEMBANGAN

- Pemanfaatan AI dalam pengelolaan informasi & layanan publik
- Dashboard Monitoring PPID berbasis data real-time
- Integrasi layanan dengan platform digital KKP
- Knowledge Management System sebagai pusat pembelajaran
- Kolaborasi dengan PPID Utama KKP, Komisi Informasi, perguruan tinggi, media, & masyarakat
- Analisis data (data analytics) untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy)

7.5 ARAH STRATEGIS TAHUN 2027

PILAR 1 DIGITAL EXCELLENCE
Digitalisasi proses bisnis, integrasi data, dan platform layanan yang modern.

PILAR 2 INSTITUTIONAL STRENGTHENING
Penyempurnaan regulasi, penguatan tata kelola, dan kapasitas organisasi.

PILAR 3 HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
Pelatihan, sertifikasi, coaching, mentoring, dan pembelajaran berkelanjutan.

PILAR 4 COLLABORATIVE GOVERNANCE
Sinergi lintas PPID, UPT, KKP, & pemangku kepentingan untuk ekosistem keterbukaan informasi yang inklusif.

PILAR 5 SUSTAINABLE PUBLIC TRUST
Keterbukaan informasi sebagai fondasi kepercayaan publik, akuntabilitas, & tata kelola pemerintahan yang baik.

7.6 ROADMAP PRIORITAS TAHUN 2027

PROGRAM STRATEGIS	TARGET TAHUN 2027
Penguatan Website PPID Terintegrasi	100% UPT Terhubung
Digitalisasi Dokumen Informasi Publik	100% Dokumen Digital
Pembinaan dan Coaching PPID	Seluruh PPID Pelaksana
Monitoring dan Evaluasi Berbasis Dashboard	Terimplementasi Nasional
Peningkatan Kompetensi SDM PPID	Seluruh Pengelola PPID Mengikuti Pelatihan
Penyempurnaan Daftar Informasi Publik	100% Terbarui
Optimalisasi Layanan Pengaduan	Terintegrasi dan Responsif
TARGET PREDIKAT PPID	**100% INFORMATIF**

7.7 KOMITMEN PPID PEMBINA

- PENGUATAN KEPEMIMPINAN
- INOVASI BERKELANJUTAN
- PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
- PEMBINAAN MENYELURUH SELURUH PPID PELAKSANA
- PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL
- BUDAYA KOLABORASI

Setiap kebijakan dan program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keterbukaan informasi sebagai instrumen strategis tata kelola yang efektif, akuntabel, dan dipercaya publik.

7.8 PENUTUP BAB VII

Evaluasi 2026 menunjukkan progres signifikan. Tantangan menjadi pendorong inovasi. Masuki 2027, fokus pada tata kelola, digitalisasi, kapasitas SDM, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan 100% PPID Informatif.

> "Keberhasilan sebuah organisasi tidak diukur dari apa yang telah dicapai hari ini, tetapi dari kemampuannya mempersiapkan masa depan. Bagi PPID Pembina BPPMHKP, setiap evaluasi adalah pijakan untuk bertransformasi, setiap tantangan adalah peluang untuk berinovasi, dan setiap langkah menuju keterbukaan informasi adalah investasi dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas."

MELANGKAH LEBIH MAJU MENUJU 100% PPID INFORMATIF 2027

TRANSPARAN • AKUNTABEL • INOVATIF • KOLABORATIF
BERDAMPAK UNTUK MASYARAKAT

TRANSPARAN Membuka informasi untuk publik
AKUNTABEL Bertanggung jawab atas setiap layanan
PROFESIONAL Melayani dengan integritas & kompetensi
ADAPTIF Tanggap terhadap perubahan
KOLABORATIF Bersinergi untuk hasil terbaik
BERDAMPAK Informasi berkualitas, untuk kemajuan bangsa

BERSAMA MEWUJUDKAN 100% BPPMHKP INFORMATIF!

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BPP MHKP
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENUTUP

Leading Transparency, Building Sustainable Public Trust

DARI PENCAPAIAN 2026 MENUJU KEUNGGULAN BERKELANJUTAN 2027 DAN SETERUSNYA

TARGET 2027
100%
PPID INFORMATIF

1 WHY WE MUST CHANGE

Mengapa Transformasi Diperlukan?

2025 TODAY

46 UPT
36
INFORMATIF
78,26%

TARGET 2027
100%
INFORMATIF

5 TANTANGAN NASIONAL

- LEADERSHIP
- EVIDENCE
- DIGITAL
- KOLABORASI
- STANDARISASI

> *"Transformasi dimulai bukan dari perubahan dokumen, tetapi dari perubahan cara **memimpin.***

CAPAIAN UTAMA TAHUN 2026

232	214	92,2%	92,1	SANGAT BAIK	100%
PERMOHONAN INFORMASI DITERIMA	PERMOHONAN DISELESAIKAN	TINGKAT PENYELESAIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	PREDIKAT PELAYANAN	UPT BPPMHKP KOORDINASI KOLABORATIF

TRANSPARAN • AKUNTABEL • INOVATIF • KOLABORATIF • PROFESIONAL

TANTANGAN STRATEGIS

1. Percepatan Transformasi Digital
2. Peningkatan Kapasitas SDM
3. Integrasi Data & Dokumentasi
4. Penguatan Budaya Transparansi
5. Adaptasi Regulasi & Teknologi

PELUANG PENGEMBANGAN

- Pemanfaatan AI & Analytics
- Dashboard Monitoring Real-time
- Integrasi Layanan Digital KKP
- Knowledge Management System
- Kolaborasi Multi-stakeholder
- Data Analytics untuk Kebijakan

ARAH STRATEGIS 2027 – 5 PILAR UTAMA

PILAR 1 DIGITAL EXCELLENCE
Digitalisasi proses, integrasi data, dan platform layanan modern.

PILAR 2 INSTITUTIONAL STRENGTHENING
Penyempurnaan regulasi, tata kelola, dan penguatan organisasi.

PILAR 3 HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
Pelatihan, sertifikasi, coaching, mentoring, dan pembelajaran berkelanjutan.

PILAR 4 COLLABORATIVE GOVERNANCE
Sinergi PPID Pembina, PPID Pelaksana, PPID Utama KKP, dan pemangku kepentingan.

PILAR 5 SUSTAINABLE PUBLIC TRUST
Keterbukaan informasi sebagai fondasi kepercayaan publik dan tata kelola yang baik.

ROADMAP PRIORITAS TAHUN 2027

PROGRAM STRATEGIS	TARGET 2027
Penguatan Website PPID Terintegrasi	100% UPT Terhubung
Digitalisasi Dokumen Informasi Publik	100% Dokumen Digital
Pembinaan dan Coaching PPID	Seluruh PPID Pelaksana
Monitoring & Evaluasi Berbasis Dashboard	Terimplementasi Nasional
Peningkatan Kompetensi SDM PPID	Seluruh Pengelola PPID Mengikuti Pelatihan
Penyempurnaan Daftar Informasi Publik	100% Terbarui
Optimalisasi Layanan Pengaduan	Terintegrasi & Responsif
TARGET PREDIKAT PPID 2027	100% INFORMATIF

KOMITMEN PPID PEMBINA

- Kepemimpinan visioner & penggerak perubahan
- Tata kelola kuat & standar layanan unggul
- Pembinaan berkesinambungan seluruh UPT
- Pemanfaatan teknologi digital yang modern
- Budaya kolaborasi & keterbukaan yang inklusif
- Fokus pada manfaat nyata bagi masyarakat

Bersama kita wujudkan 100% PPID Informatif untuk tata kelola pemerintahan yang unggul, transparan, dan terpercaya.

BERGERAK BERSAMA

100% PPID INFORMATIF

UNTUK INDONESIA MAJU, TRANSPARAN, DAN TERPERCAYA

TERIMA KASIH

Kepada seluruh pimpinan, PPID Utama KKP, PPID Pelaksana, UPT, mitra kerja, akademisi, media, pelaku usaha, dan masyarakat atas dukungan, sinergi, dan kepercayaan.

Keterbukaan informasi membuka akses, memperkuat kolaborasi, menumbuhkan kepercayaan, dan menghadirkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berdampak.

TRANSPARAN Membuka informasi untuk publik | **AKUNTABEL** Bertanggung jawab atas setiap layanaan | **INOVATIF** Menciptakan solusi untuk masa depan | **KOLABORATIF** Sinergi untuk hasil terbaik | **ADAPTIF** Tanggap terhadap perubahan | **BERDAMPAK** Manfaat nyata untuk negeri

#PPIDBPPMHKP
#100PERSENINFORMATIF2027

KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BPP
MHKP

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN BUKTI DUKUNG:

1. UNDANGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor	:	B.2124/BPPMHKP.1/TU.330/VI/2026	17 Juni 2026
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	Satu Berkas	
Hal	:	Rapat Pembinaan Pengisian SAQ Monev PPID 2026 Lingkup BPPMHKP	

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dalam meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan Pembin[redacted]Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monev PPID 2026 Lingkup B[redacted]HKP yang akan diselenggarakan pada :

hari, tanggal	:	Selasa, 23 Juni 2026
waktu	:	Pukul 09.00 WIB – selesai
tempat	:	Ruang Rapat Carpio Kecil, GMB II Lt.6, Sekretariat BPPMHKP, Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat
hybrid		Zoom Meeting Application *Meeting ID: 431 463 0291* *Passcode: PPID*

Mengingat keterbatasan kapasitas ruang rapat, mohon kiranya Saudara dapat menugaskan 1 (satu) orang pegawai yang kompeten untuk hadir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,

Ditandatangani Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

2

Lampiran I
Nomor : B.2124/BPPMHKP.1/TU.330/VI/2026
Tanggal : 17 Juni 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DIUNDANG

A. Kementerian Kelautan dan Perikanan:
1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal
2. Ketua Tim Kerja Layanan Informasi Publik, BHKLN Selpan
3. Ketua Tim Kerja Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat BPPMHKP
4. Anggota Tim Kerja Layanan Informasi Publik, BHKLN Selpan
5. Anggota Tim Kerja Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat BPPMHKP

B. Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP
1. Kepala Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I
2. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I
3. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung P[redacted]
4. Kepala Balai Peng[redacted]an dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lampung
5. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta
6. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang
7. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya II
8. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong
9. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ballapapan
10. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru
11. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan
12. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Denpasar
13. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar
14. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar

[redacted]

15. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado
16. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon
17. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jayapura
18. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banda Aceh
19. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan II
20. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Asahan
21. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang
22. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru
23. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi
24. Kepala Stasiun Pen[redacted]alian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembar[redacted]
25. Kepala Stasiun Pen[redacted]alian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu
26. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang
27. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Batam
28. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak
29. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung
30. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Cirebon
31. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta
32. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak
33. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangkaraya
34. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang
35. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima
36. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

37. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu
38. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai
39. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari
40. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau
41. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo
42. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna
43. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate
44. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong
45. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke
46. Kepala Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakar[redacted]

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,

Ditandatangani Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. NOTULENSI

NOTULENSI BIMBINGAN TEKNIS DAN PROGRAM AKSELERASI KETERBUKAAN

Pimpinan Rapat	:	Woro Nur Endang Sariati (Sekretaris BPPMHKP)
Agenda Kegiatan	:	Bimbingan Teknis dan Pembinaan Pengisian SAQ/SIQ Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026
Waktu Pelaksanaan	:	Selasa, 23 Juni 2026 (09.00-selesai)
Peserta	:	1. Katimja Kerja Sama dan Humas, Sekretariat BPPMHKP 2. Katimja Layanan Informasi Publik, BHKLN Setjen 3. Anggota Layanan Informasi Publik, BHKLN Setjen 4. Angggota Kerja Sama dan Humas, Sekretariat BPPMHKP 5. Seluruh UPT BPPMHKP
Pokok-pokok Pembahasan		A. Arahan Umum Pelaksanaan Monev KIP 2026 - Tim PPID Pusat menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan akhir pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ/SIQ) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. - Target utama yang ditetapkan adalah seluruh UPT lingkup BPPMHKP memperoleh predikat **Informatif** sebelum memasuki tahap verifikasi dan penilaian akhir. - Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, UPT dibagi menjadi dua kelompok pembinaan, yaitu: 1. Kluster Prioritas (Satgas) Terdiri atas 11 UPT yang masih memerlukan pendampingan intensif karena capaian nilai belum memenuhi target informatif. 2. Kluster Reguler UPT lainnya dibagi ke dalam empat wilayah pendampingan dengan mentor yang telah ditunjuk untuk memberikan asistensi teknis selama proses pengisian SIQ. B. Target dan Batas Waktu Pengisian SIQ Disampaikan bahwa: - Batas akhir pengisian SIQ adalah **5 Juli 2026**. - Setelah tanggal tersebut, sistem akan memasuki tahap verifikasi dan penilaian. - Seluruh data dan dokumen pendukung harus sudah lengkap sebelum batas waktu tersebut. - UPT diminta tidak menunda pengunggahan dokumen untuk menghindari kendala teknis menjelang penutupan sistem. C. Penekanan Predikat Informatif

		- Tim PPID menegaskan bahwa fokus utama bukan hanya memperoleh nilai tinggi, melainkan mencapai predikat **Informatif**. - Rentang nilai kategori informatif berada pada kisaran: **90 – 99,8** - Oleh karena itu, seluruh UPT diminta memastikan setiap indikator terisi lengkap dan sesuai ketentuan. D. Ketentuan Penggunaan Link Dokumen Ditekankan bahwa: - Link yang dimasukkan harus mengarah langsung ke website PPID . - Tidak diperkenankan menggunakan link repositori internal sebagai link utama. - Link Google Drive tidak diperbolehkan sebagai tautan publik utama. - Kesalahan penggunaan link dapat menyebabkan penurunan nilai secara otomatis oleh sistem. - Beberapa UPT masih ditemukan menggunakan link repositori sehingga diminta segera melakukan perbaikan. E. Penggunaan Surat Pernyataan Untuk indikator yang tidak memiliki dokumen pendukung, diwajibkan membuat surat pernyataan resmi.Surat pernyataan diperlukan apabila: - Tidak terdapat dokumen tender/pengadaan. - Tidak terdapat perjanjian kerja sama. - Tidak terdapat dokumen swakelola. - Tidak terdapat dokumen kemitraan. - Surat pernyataan harus ditandatangani oleh Kepala UPT dan diunggah sebagai bukti pendukung. F. Ketentuan Tanda Tangan Dokumen Disampaikan bahwa dokumen pendukung dapat menggunakan: - Tanda tangan elektronik (TTE); atau - Tanda tangan basah yang dipindai (scan). Kedua bentuk tanda tangan tersebut dinyatakan sah untuk kebutuhan penilaian. G. Arahan Umum Pelaksanaan Monev KIP 2026 - Tim PPID Pusat menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan akhir pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ/SIQ) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. - Target utama yang ditetapkan adalah seluruh UPT lingkup BPPMHKP memperoleh predikat **Informatif** sebelum memasuki tahap verifikasi dan penilaian akhir. - Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, UPT dibagi menjadi dua kelompok pembinaan, yaitu: 3. Kluster Prioritas (Satgas)

		Terdiri atas 11 UPT yang masih memerlukan pendampingan intensif karena capaian nilai belum memenuhi target informatif. 4. Kluster Reguler UPT lainnya dibagi ke dalam empat wilayah pendampingan dengan mentor yang telah ditunjuk untuk memberikan asistensi teknis selama proses pengisian SIQ. H. Target dan Batas Waktu Pengisian SIQ Disampaikan bahwa: - Batas akhir pengisian SIQ adalah **5 Juli 2026**. - Setelah tanggal tersebut, sistem akan memasuki tahap verifikasi dan penilaian. - Seluruh data dan dokumen pendukung harus sudah lengkap sebelum batas waktu tersebut. - UPT diminta tidak menunda pengunggahan dokumen untuk menghindari kendala teknis menjelang penutupan sistem. I. Penekanan Predikat Informatif - Tim PPID menegaskan bahwa fokus utama bukan hanya memperoleh nilai tinggi, melainkan mencapai predikat **Informatif**. - Rentang nilai kategori informatif berada pada kisaran: **90 – 99,8** - Oleh karena itu, seluruh UPT diminta memastikan setiap indikator terisi lengkap dan sesuai ketentuan. J. Ketentuan Penggunaan Link Dokumen Ditekankan bahwa: - Link yang dimasukkan harus mengarah langsung ke website PPID . - Tidak diperkenankan menggunakan link repositori internal sebagai link utama. - Link Google Drive tidak diperbolehkan sebagai tautan publik utama. - Kesalahan penggunaan link dapat menyebabkan penurunan nilai secara otomatis oleh sistem. - Beberapa UPT masih ditemukan menggunakan link repositori sehingga diminta segera melakukan perbaikan. K. Penggunaan Surat Pernyataan Untuk indikator yang tidak memiliki dokumen pendukung, diwajibkan membuat surat pernyataan resmi.Surat pernyataan diperlukan apabila: - Tidak terdapat dokumen tender/pengadaan.

		- Tidak terdapat perjanjian kerja sama. - Tidak terdapat dokumen swakelola. - Tidak terdapat dokumen kemitraan. - Surat pernyataan harus ditandatangani oleh Kepala UPT dan diunggah sebagai bukti pendukung. L. Ketentuan Tanda Tangan Dokumen Disampaikan bahwa dokumen pendukung dapat menggunakan: - Tanda tangan elektronik (TTE); atau - Tanda tangan basah yang dipindai (scan). Kedua bentuk tanda tangan tersebut dinyatakan sah untuk kebutuhan penilaian.
Kesimpulan		1. Seluruh UPT harus memprioritaskan penyelesaian pengisian SIQ sebelum batas waktu yang ditetapkan. 2. Predikat yang dituju adalah **Informatif**, bukan sekadar memperoleh nilai tinggi. 3. Kesesuaian dokumen dan validitas link menjadi faktor penting yang sangat memengaruhi penilaian. 4. Surat pernyataan wajib digunakan apabila indikator tertentu tidak memiliki dokumen pendukung. Tim PPID Pusat akan terus melakukan pendampingan melalui mekanisme kluster dan mentor wilayah hingga seluruh UPT mencapai target.

3. DOKUMENTASI KEGIATAN ASISTENSI PENGISIAN SAQ KE UPT LINGKUP BADAN MUTU SELURUH INDONESIA

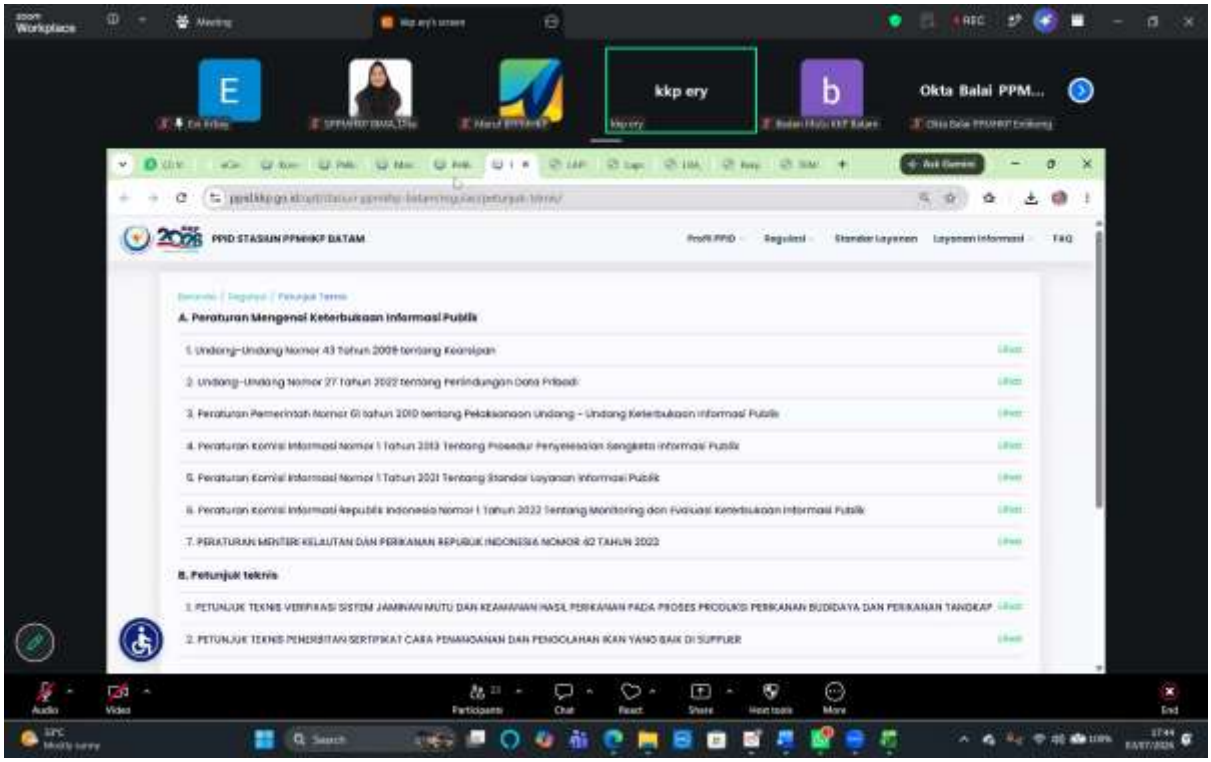

Wihdatul Adiya...
Adahar_SPPMH...
Informasi !
Keberatan Informasi Publik
badanmutukkp_babel
No comments yet.
Start the conversation.
Messages

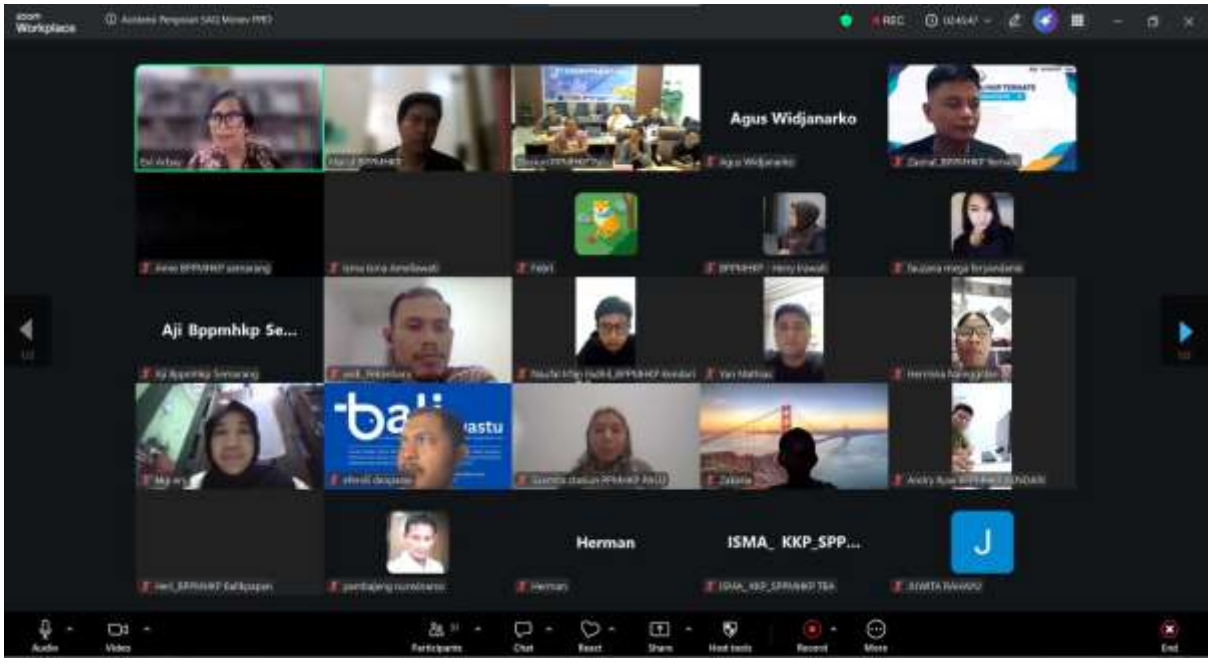
Agus Widjanarko
Aji Bppmhkp Se...
Herman
ISMA_ KKP_SPP...

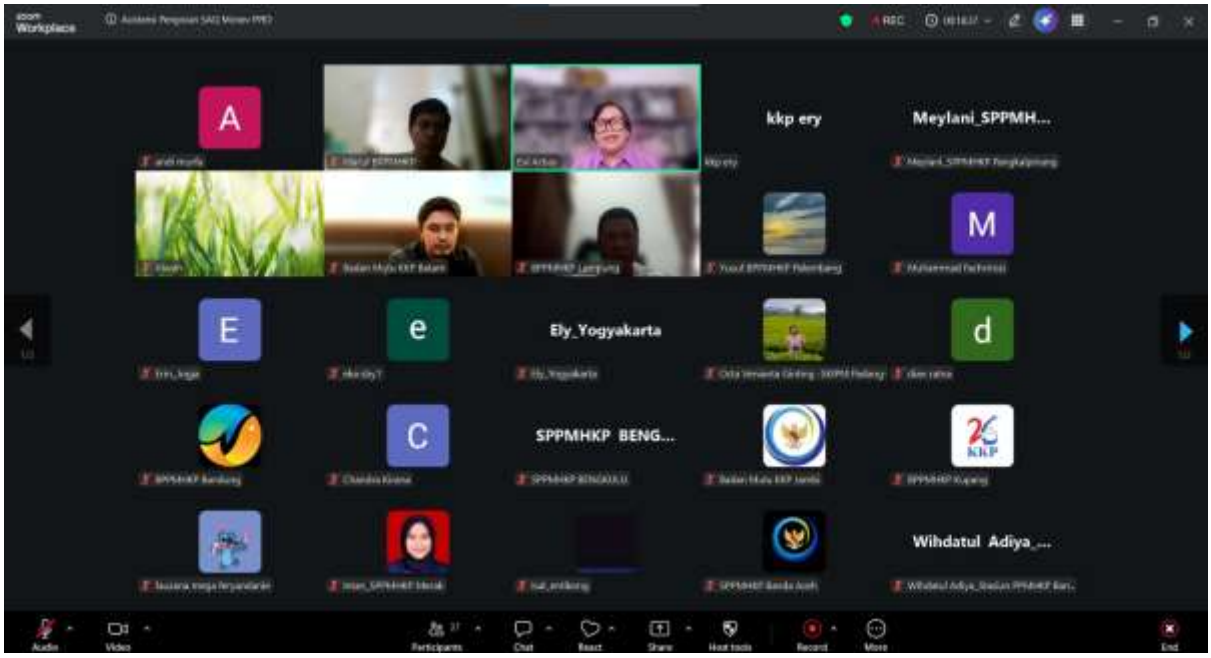
kkp ery
Meylani_SPPMH...
Ely_Yogyakarta
SPPMHKP BENG...
Wihdatul Adiya_...

You 19:21
untuk tugas dan fungsi yang blm masuk kedalam profil upt bisa di di masukan kedalam folder ini https://drive.google.com/drive/fol s/1e90s9zPvsyugRB8ZaIoJFzEvkM7hs J4n?usp=sharing
Preview
Tugas dan Fungsi Profil UPT - Google Drive
This browser version is no longer supported. Please upgrade to a supported browser. Learn More Dismiss
Google Drive
Amie BPPMHKP semarang 19:22
izin bertanya untuk maklumat juga masuk ke informasi tugas dan fungsi mba? atau hanya tugas dan fungsi saja
2 new
Today
18:06 - meeting started
Amie BPPMHKP semarang 18:31
kedengeran mbaa, Semarang hadir
efendi denpasar 18:44
izin efendi dari Denpasar bu
Naufal Irfan Fadhil_BPPMHKP Kendari 18:44
Kendari hadir bu🙏
Messages sent to everyone will be saved in a new post-meeting chat, which can be seen by all its members.
All newly-joined users can view the meeting chat history.
Amie BPPMHKP semarang 18:55
makasi bu henny dukungannya 🥰
BPPMHKP - Heny Irawati 18:55
🥰

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BPPMHKP

Kolase Foto

ASISTENSI HARI KE-1
KLASTER 1
LINGKUP BPPMHKP

Kamis, 25 Juni 2026 | 18.30 - Selesai WIB

BERSAMA MEMPERKUAT KOMUNIKASI PUBLIK & REPUTASI UNTUK BADAN MUTU YANG TERPERCAYA

FOKUS PEMBAHASAN KLASTER 1

- Pengelolaan & Tata Kelola PPID
- Kualitas Layanan Informasi Publik
- Penguatan Pengisian SAQ & Eviden
- Keterbukaan Informasi Berkelanjutan
- Monitoring & Evaluasi Kinerja
- Strategi Komunikasi & Reputasi

HIGHLIGHT KEGIATAN

- **Pendampingan intensif pengisian SAQ**
  Pemahaman indikator, bukti dukung, dan strategi optimal
- **Diskusi interaktif & berbagi praktik baik**
  Antar UPT untuk komunikasi publik yang efektif
- **Evaluasi & solusi bersama**
  Mengatasi kendala dan meningkatkan kualitas dokumen SAQ
- **Semangat kolaborasi**
  Satu visi, satu langkah menuju 100% Informatif 2026

> "Bersama kita bangun komunikasi publik yang kuat, transparan, dan berdampak bagi masyarakat.

TARGET KITA
100% UPT BPPMHKP
INFORMATIF 2026

100% INFORMATIF TARGET

TERIMA KASIH
Kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif dan komitmen bersama.
Sampai jumpa di sesi berikutnya!

#PPIDBPPMHKP
#100%INFORMATIF

TRANSPARAN | AKUNTABEL | INOVATIF | KOLABORATIF | BERINTEGRITAS

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BPP MHKP
BPPMHKP

Kolase Foto

ASISTENSI HARI KE-2
KLASTER 2
LINGKUP BPPMHKP

Jumat, 26 Juni 2026 | 13.30 - Selesai WIB

BERSAMA MEMPERKUAT KOMUNIKASI PUBLIK & REPUTASI UNTUK BADAN MUTU YANG TERPERCAYA

FOKUS PEMBAHASAN KLASTER 2

- Pengelolaan Media Daring & Sosial
- Pembuatan Materi Publikasi
- Peliputan Berita & Pendampingan Pimpinan
- Konferensi Pers & Keterangan Pers
- Monitoring & Evaluasi Isu Berita
- Wawancara Pers & Partisipasi Pameran
- Advertorial

HIGHLIGHT KEGIATAN

- **Pendampingan intensif pengisian SAQ**
  Pemahaman indikator, bukti dukung, dan strategi optimal
- **Diskusi interaktif & berbagi praktik baik**
  Antar UPT untuk komunikasi publik yang efektif
- **Evaluasi & solusi bersama**
  Mengatasi kendala dan meningkatkan kualitas dokumen SAQ
- **Semangat kolaborasi**
  Satu visi, satu langkah menuju 100% Informatif 2026

> "Bersama kita bangun komunikasi publik yang kuat, transparan, dan berdampak bagi masyarakat.

TARGET KITA
100% UPT BPPMHKP
INFORMATIF 2026

100% INFORMATIF TARGET

TERIMA KASIH

Kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif dan komitmen bersama.

Sampai jumpa di sesi berikutnya!

#PPIDBPPMHKP
#100%INFORMATIF

TRANSPARAN | AKUNTABEL | INOVATIF | KOLABORATIF | BERINTEGRITAS

ppid.kkp.go.id/upp/bppmhkp | PPID BPPMHKP | ppid_bppmhkp

4. CATATAN PENILAIAN INTERNAL UPT LINGKUP BADAN MUTU

urutan Penilaian pada 1-3 Juli :

1. Balikpapan

2. Aceh

3. Palu

4. Semarang
5. Jogjakarta

6. Bengkulu

7. Ternate
8. Medan I
9. Entikong
10. Batam
11. Aceh-Perbaikan.
12. Pangkalpinang
13. Bima

Bsok, Sabtu.

1. Tahuna

2. Merauke

3. Merak

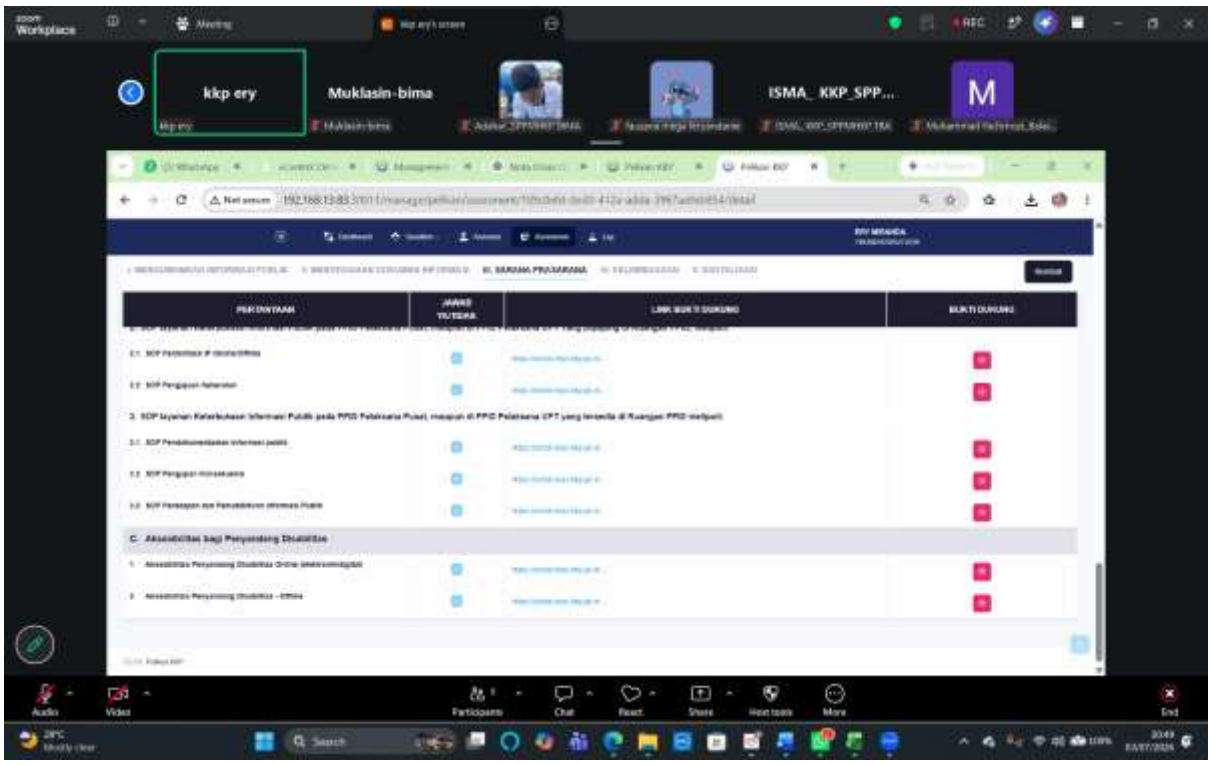

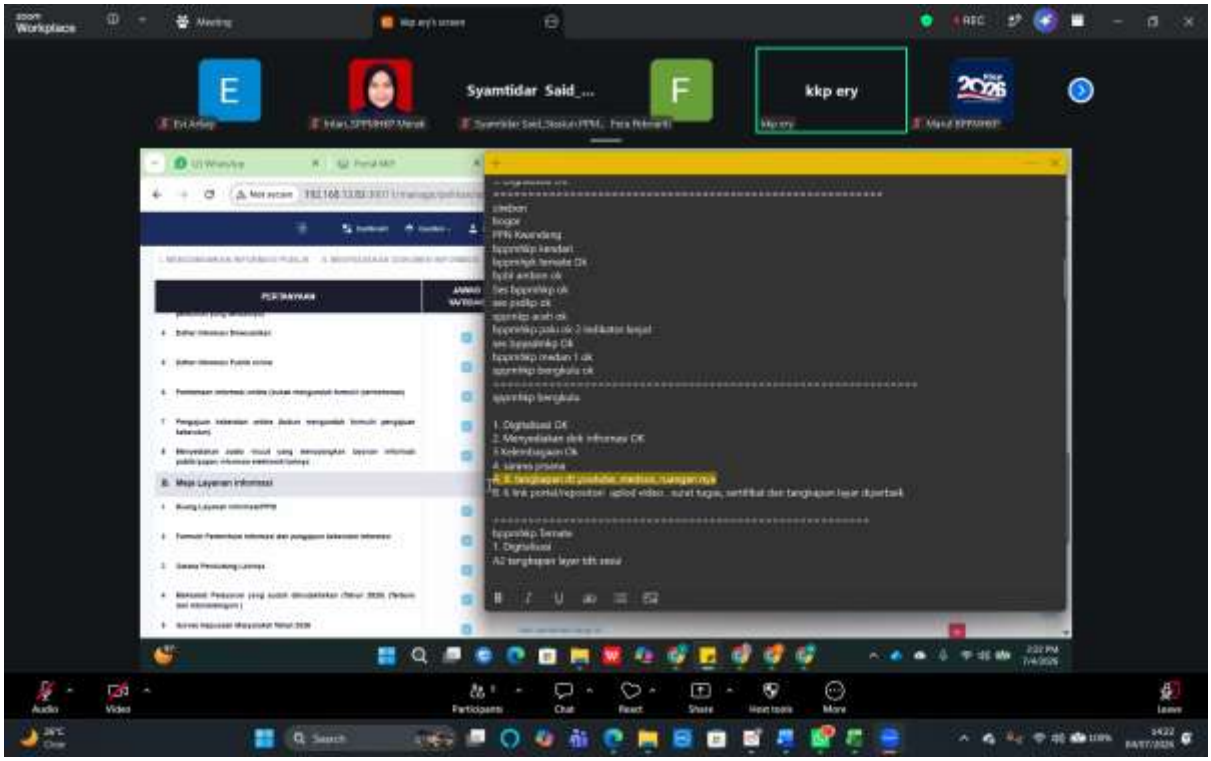

1. BPPMHKP Entikong

1. Digitalisasi ok

2. Kelembagan

1.1 link erro

1.2 lhpkp bendahara informasi

B.2 tangkapan layar dokumen dibuka

3.Mengumumkan Informasi Publik

A.2 lhkpn bendahara

4. Sarana Prasarana

A.2 ss calk diupload di repo

2.3 erro -2.23

B.1-2 error limk

c.1 tangkapan layar di buka dokumennya

c.2 tangkapan layar dibuka

c.3 surat pernyataan tidak ada penggaduan

5. sarana prsarana

1.10 link error

3.1 cek link ke 3

8. tangkapan layar blm ada dr youtube, medsos, ruang layanan

B. 1 tangkapan layar dibuka dokumen

B.3 komputer ruangan layanan

6. surat tugas blm ada

3.3-1 ,3-3 sop yg infografis

2. BPPMHKPN Batam

1. Digitalisasi
   A.1 sampai A4 cek facebook link tidak buka
  A4 link tidak sesuai dg pertanyaan dan tangkapan layar sudah ok

2. Kelembagaan
1.1 link cek error
B.3 sertifikat 2025
3. Menyediakan Informasi Publik
A.1 Link error
B.2 link ke 3 error
c. 1.3 ss langsung calk
D.2 Surat Pernyataan
S.3 Surat Pernyataan
4. Menyediakan Dok Inf
A.2 ss calk uplod di repo
2.1 - 2.32 surat penyataan di tambahk keterangan paket 1 dan 2
C. 3 surat pernyataan tidak ada pengaduan
5. Sarana Prasarana
5. Daftar Informasi Publik online bukan SK
8. tangkapan layar youtube, medsos danruangan layanan

3. SPPMHKP Pangkal Pinang
1. Digitalisasi
tambahan 2 link medsos
A.3 alur tambahakn waktu 10 +7 hari kerja
2. Kelembagaan
1. 1 cek link error
1.3 cek link error
B.1 link error
B.3 sertifikat 2025 blm ada yg dari pusat
3. Mengumumkan IP
A. 1 link web kkp
2. link error dan tangkapan layar lhkpn kepala upt blm ada
c 1.3 ss calk nya
C.3 nformasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Eselon 1 /UPT pada semester 1 Tahun 2026
D. 1 https://sirup.inaproc.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/62849122
https://sirup.inaproc.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/62849121
4. Menyediakan dok.informasi
A.2 masukan ke repo Dokumen laporan keuangan hasil audit Tahun 2025 lengkap terdiri dari CALK, LRA, Neraca dan Daftar Aset dan Investasi
B1. surat pernyataan 2025-2026
C.2 infografis saja 2025-2026
C.6 tangkapan layar dibuka

4. SPPMHKP Bima
1. Digitalisasi
A.3 alur diperbaiki waktu 10+7 hari kerj
2. Kelembagaan
1.3 lhkp diperbaiki all
B.1 Surat tugas PPID
3. Mengumumkan IP
A.1 link error
A. 2 LHKPN
B.1 link error
D,2 dan D3 surat pernyataan (woording dan paket 1&paket2)
4. menyampaikan dok.I
A,2 kurang laporan BMN
2.1 - 2.32 surat pernyataan all
B.1 dan B.2 surat pernyataan all
C.2 infografis
C3 surat pernyataan tdk ada pengaduan 2025-2026
C4. web ppid
C6 perbaiki link
2.3 infografis
2.8 renstra
2.10 video error
8. tangkapan layar kurang youtube, medsos
B.3 informasi ppid, spanduk,
C. 1 tambahkan link webppid

5. Sppmhkp Tahuna

1. Digitalisasi

A.1 tiktok di ganti linknya (Link web ppid dihapus)

A.2 tiktok di ganti linknya (Link web ppid dihapus)

A.3 Link dihapus karena tidak sesuai contohnya https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-ppmhkp-tahuna/standart-layanan/mekanisme-pelayanan/ upload ke medsos

A.4 tiktok di ganti linknya (Link web ppid dihapus)

2. Kelembagaan

A.1.1 perbaiki link

1.3 berikan informasi lhkpn kepala upt dan bendahara => contoh

https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/dropzone/WORDING_lHKPN.pdf

B. 1 kurang perjanjian kinerja

3. Mengumumkan IP.

A.1 Link error

A.2 informasi lhkpn

B.1 Link error

B.2 tangkapan layar bukan dokumen

C.1.1 cek link dan tangkapan layar blm sesuai

1.2 tangkapan layar bukan dokumen

1.4 tangkapan layar bukan dokumen

D.1 RUP 1. https://sirup.inaproc.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/67342240

2. https://sirup.inaproc.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/67342245

D.2.1 dan 2.2 surat pernyataan

D.3.1 - 3.2 surat pernyataan

4. Menyediakan Dok.I

A.2 tangkapan layar dokumen terkahir dibuka

A.3 tangkapan layar dokumen terkahir dibuka

B. 1 surat pernyataan

C. 1 sampling 2 surat setiap tahunnya

C.2 link pertama tidak kebuka , link kedia link web ppid seharusnya portal

5. Saran Prsarana

1.7 link ini https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-ppmhkp-tahuna/standart-layanan/mekanisme-pelayanan/

2.1 SK DIP dan tangkapan llayar

2.8 kurang renja /rkt tangkapan layar juga

2.16:https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Salinan_dari_SK_PPID_tentang_Standar_Pelayanan_.docx_bLcY54u.pdf

3.1 cek link pertama

6. tangkapan layar bukan dokumen

B. 2 formulir keberatan blm ada dann tangkapan layar blm ada

B.4 dokumen maklumat bukan tangkapan layar

B.6 surat tugas blm ada di repo.

C.1 aplikasi hear me atau yg ada di web ppid

6. Sppmhkp merauke
1. Dgitalisasi Ok
2. Kelembagaan
1.1 cek link
1.2 tangkapan layar lhkpn bendahara
B. 3 sertifikat 2025
3. Mengumumkan Informasi Publik
A.1 cek link
2.1 dan 2.2 surat pernyataan
4. Menyediakan Dok.Informasi
2.1 - 2.32 surat pernyaataan
C.6 pisah 2025 dan 2026
5. sarana Prasarana
2.1 dan 2.2 penambahan di tangkapan layar

7. Sppmhkp Merak
1. Digitalisasi Ok
2. Kelembagaan
1.1 link error
1.3 lhkpn bendahara
2.3 Link SOP Uji Konsekuensi (Daftar Informasi Dikecualikan-DIK) diperbaiki
3. Mengumumkan IP
D1. https://sirup.inaproc.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/62638971
D1 https://sirup.inaproc.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/62638963
4. Menyediakan Dok Informasi
2.ss calk di masukan ke repo
C.4 laporan ke web ppid
C.6 2025 -2026 masing masing 16
5. Sarana Prasarana
1.5 langs ke web ppid
2.15 informasi bahwa terbuka bagi masyarakat berdasarkan masa berlaku atau uji konsekuensi

5. Asistensi Penilaian Internal ke 3 / Sabtu, 11 Juli 2026 jam 10.00 – 23.55 WIB

Urutan Penilaian UPT :

1. Lampung ✅
2. Ambon ✅
3. Semarang,Ternate, Pangkal Pinang(Perbaikan) ✅,
4. Jambi ✅
5. Bandung ✅
6. Bau-bau ✅
7. Jayapura ✅
8. Denpasar ✅
9. Mamuju ✅
10. Gorontalo ✅
11. Banjarbaru ✅
12.Tarakan ✅
13.kendari ✅

14. Yogya ✅

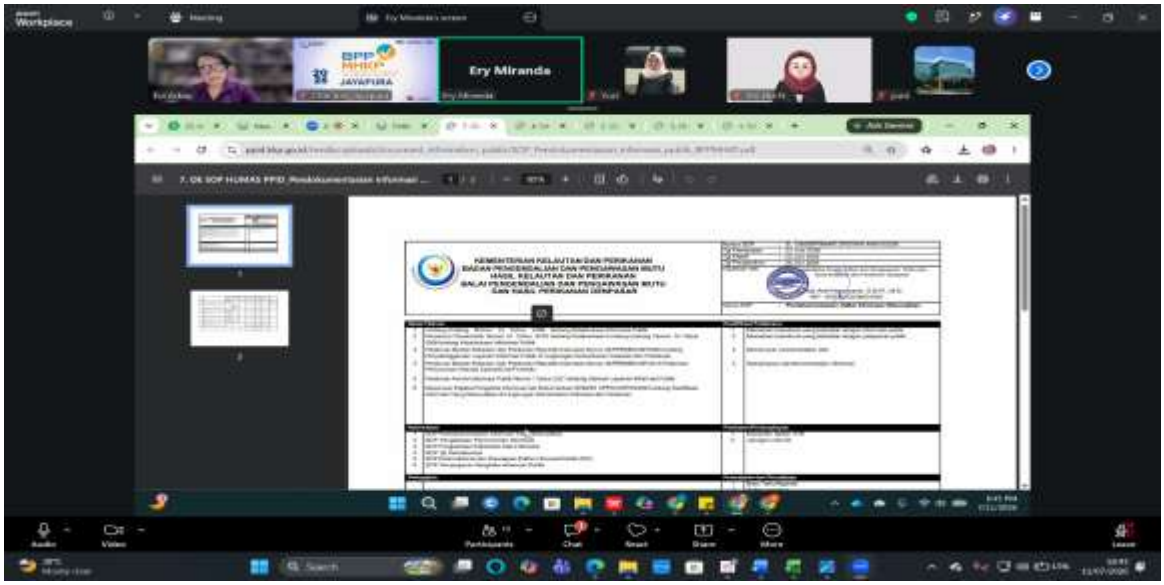

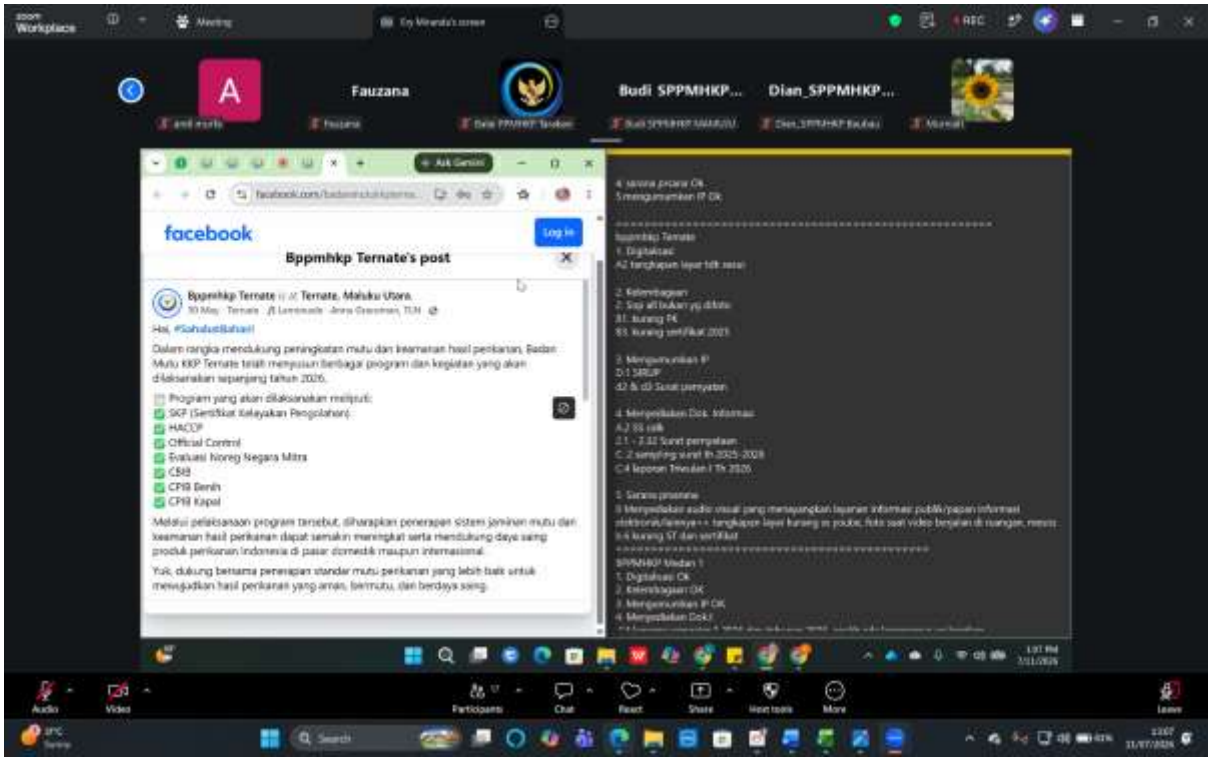
Fauzana
Budi SPPMHKP...
Dian_SPPMHKP...
facebook
Bppmhkp Ternate's post

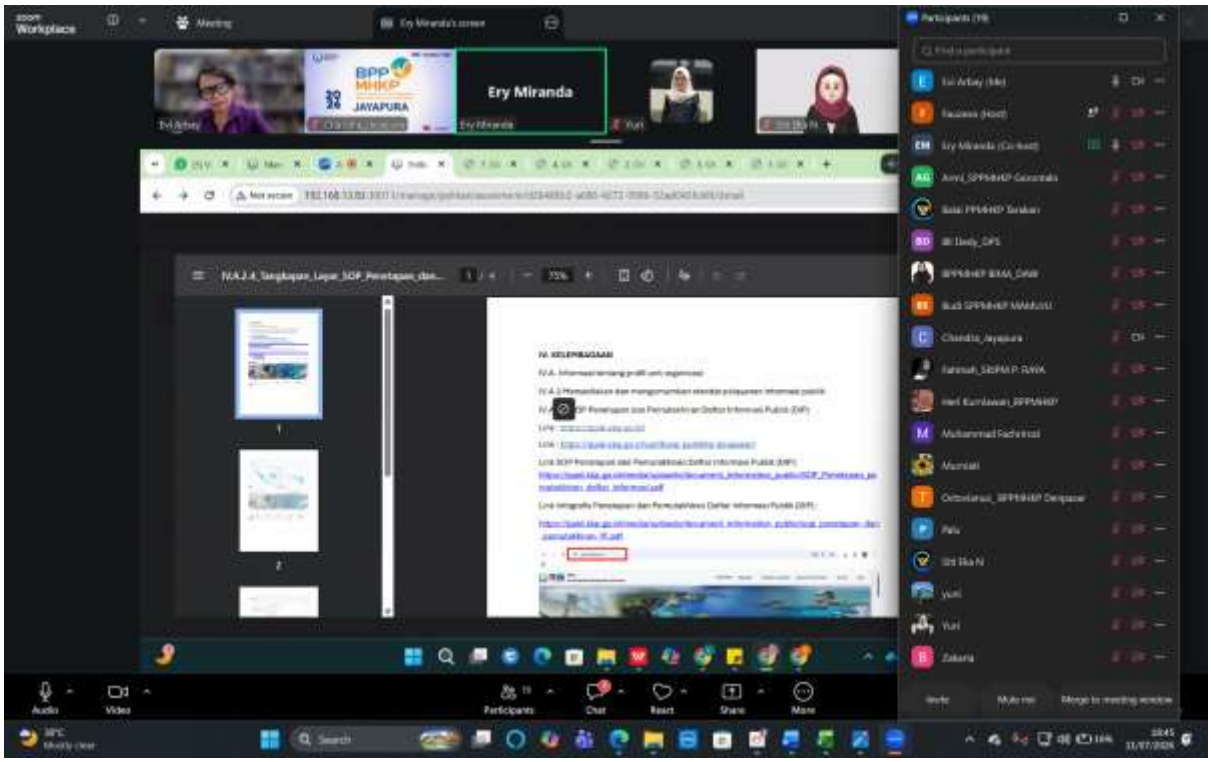
Ery Miranda
BPP MHKP JAYAPURA

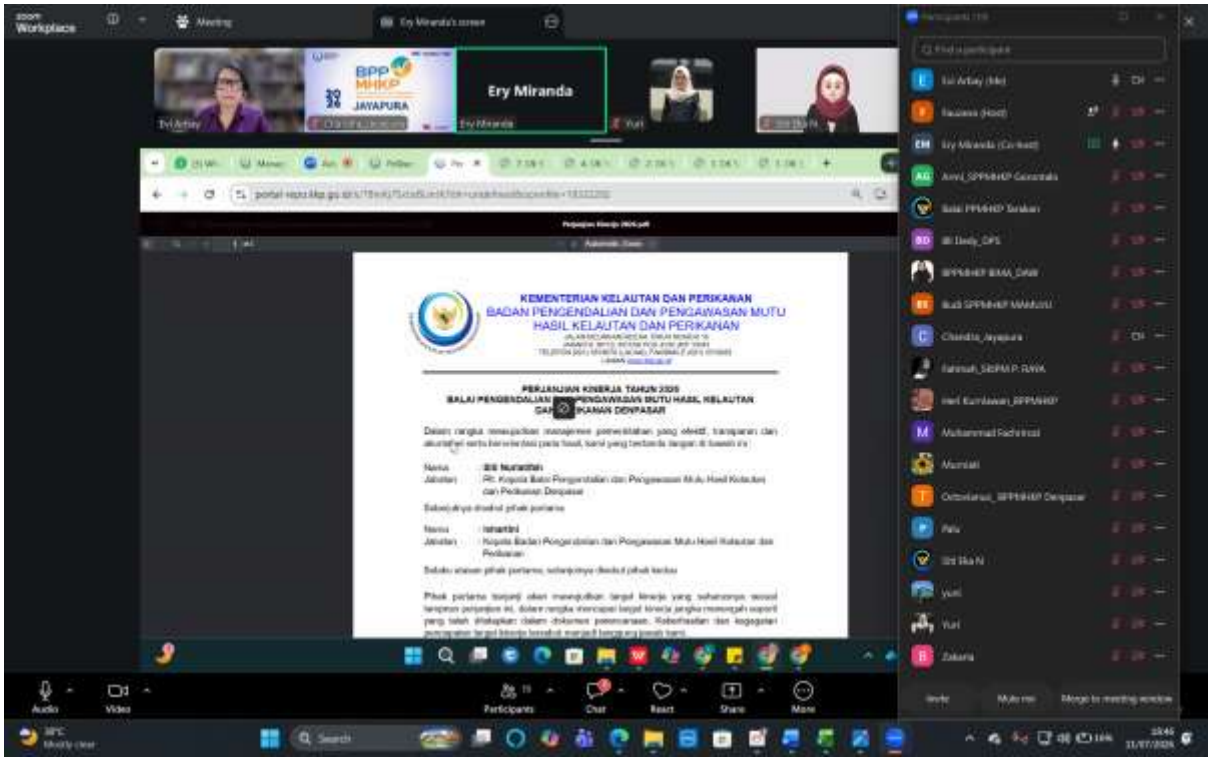
Ery Miranda
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

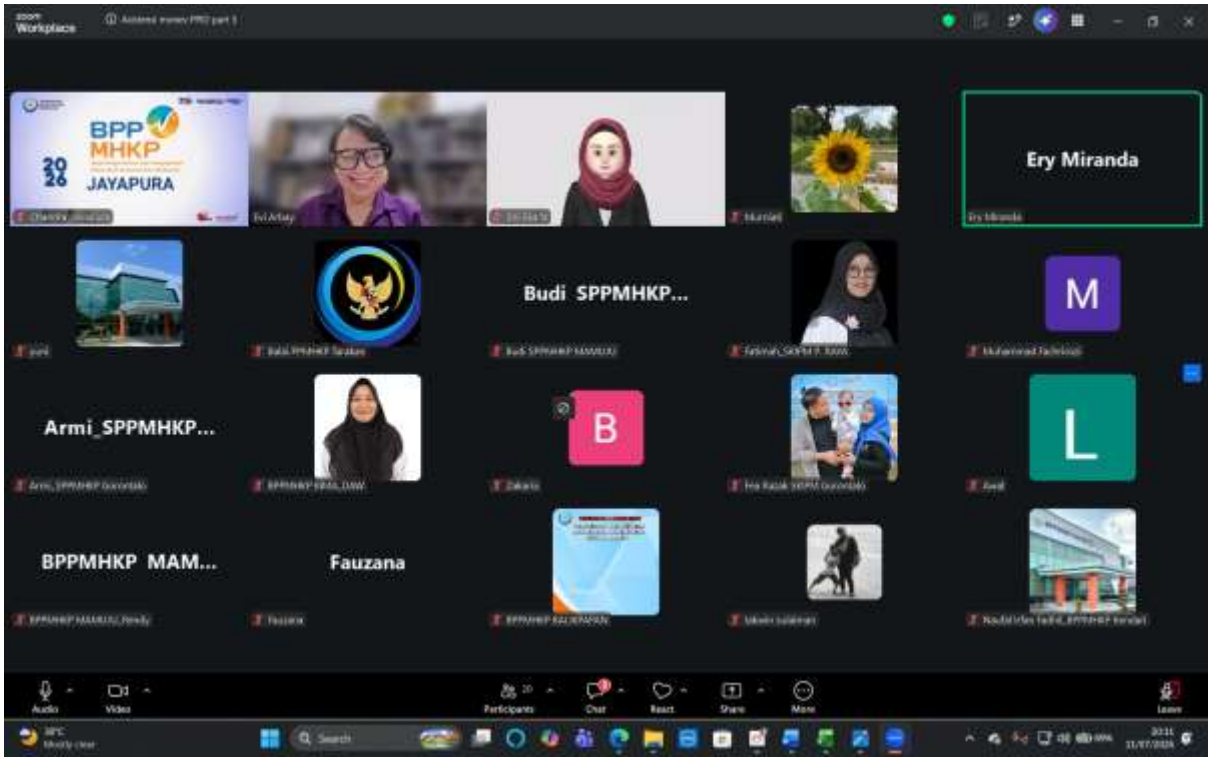
BPP MHKP JAYAPURA
Ery Miranda
Budi SPPMHKP...
Armi_SPPMHKP...
BPPMHKP MAM...
Fauzana

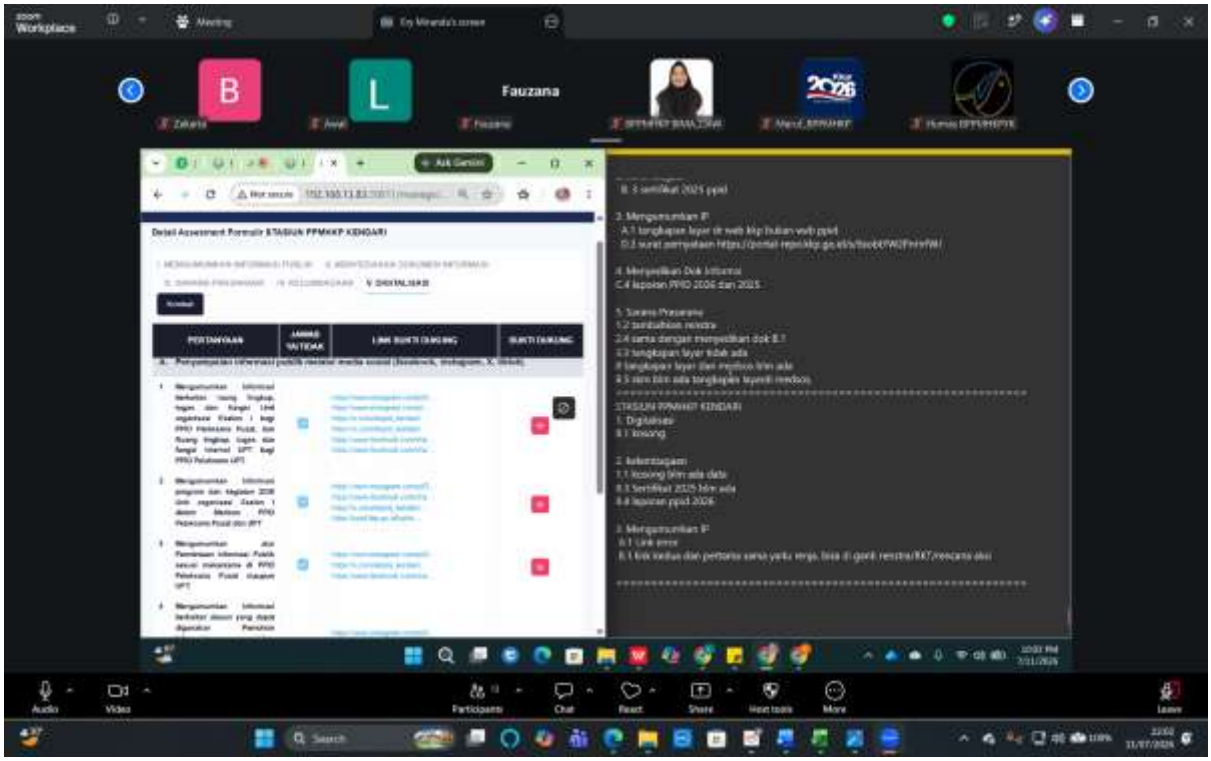
Fauzana
Detail Assessment Formulir STASIUN PPMKKP KENDARI
PERTANYAAN
LINK BUKTI DUKUNG
BUKTI DUKUNG

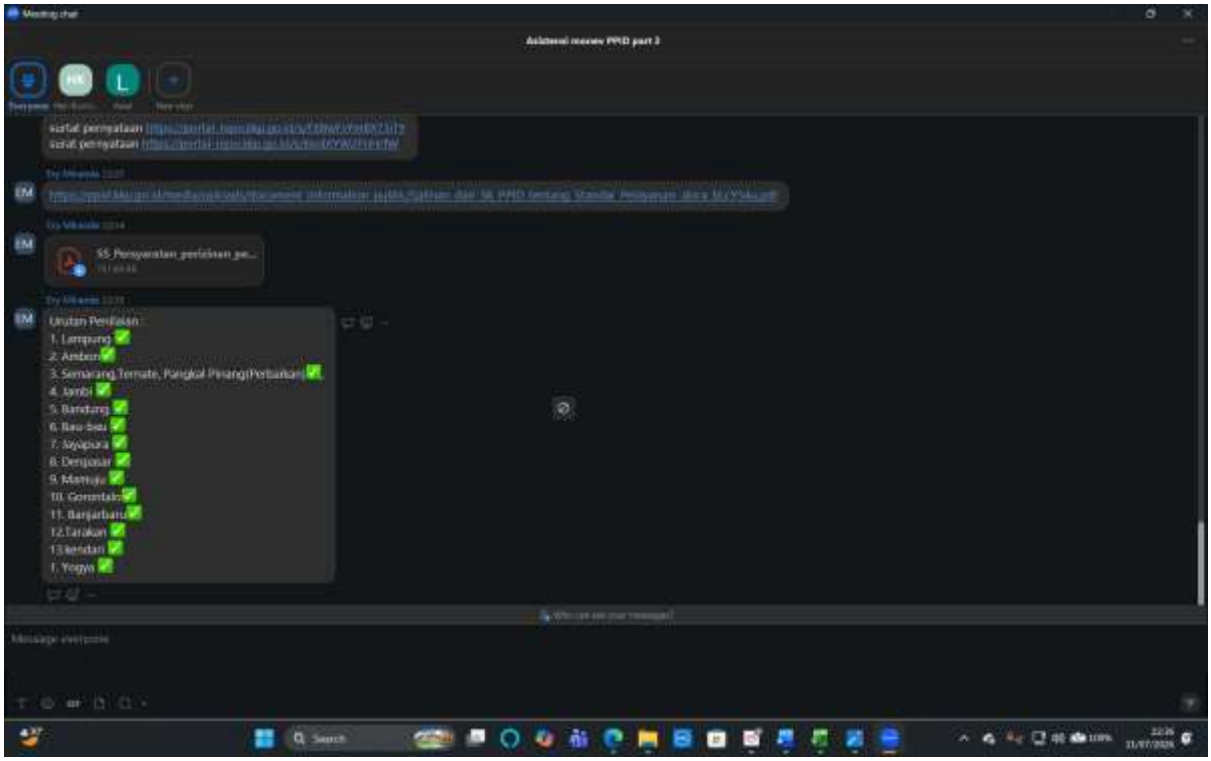
Meeting chat
Asistensi review PPID part 3
surat pernyataan
surat pernyataan
Urutan Penilaian
1. Lampung
2. Ambon
3. Semarang,Ternate, Pangkal Pinang(Perbaikan)
4. Jambi
5. Bandung
6. Bau-bau
7. Mayapura
8. Denpasar
9. Mamuju
10. Gorontalo
11. Banjarbaru
12.Tarakan
13.kendari
1. Yogya

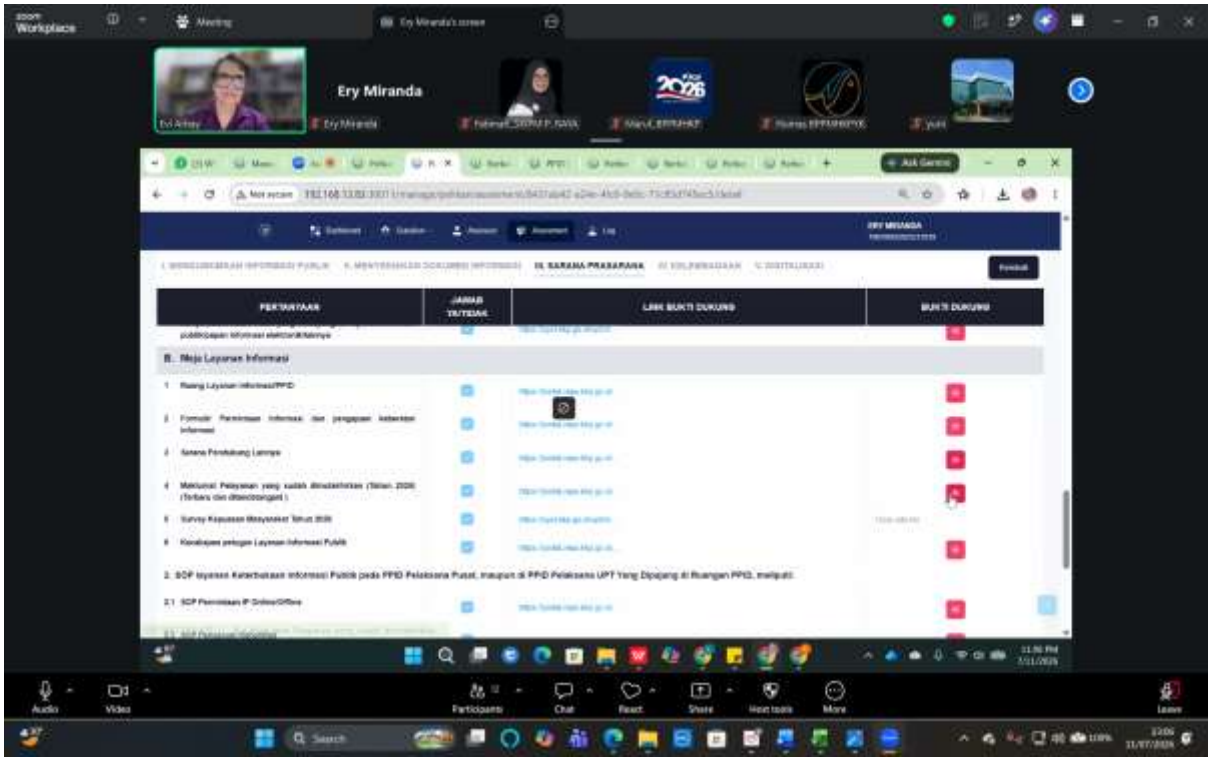
Ery Miranda
PERTANYAAN
JAWAB TUTUPAN
LINK BUKTI DUKUNG
BUKTI DUKUNG
B. Meja Layanan Informasi

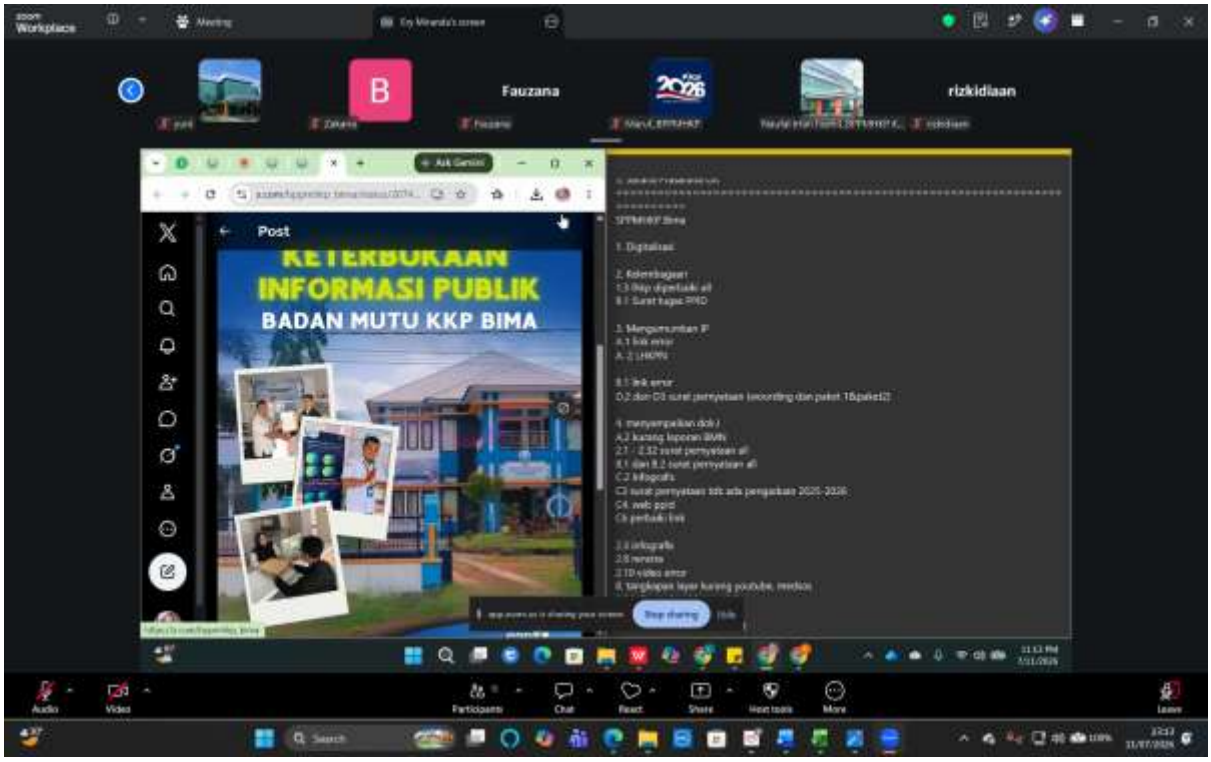
Fauzana
rizkidiaan
Post
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
BADAN MUTU KKP BIMA

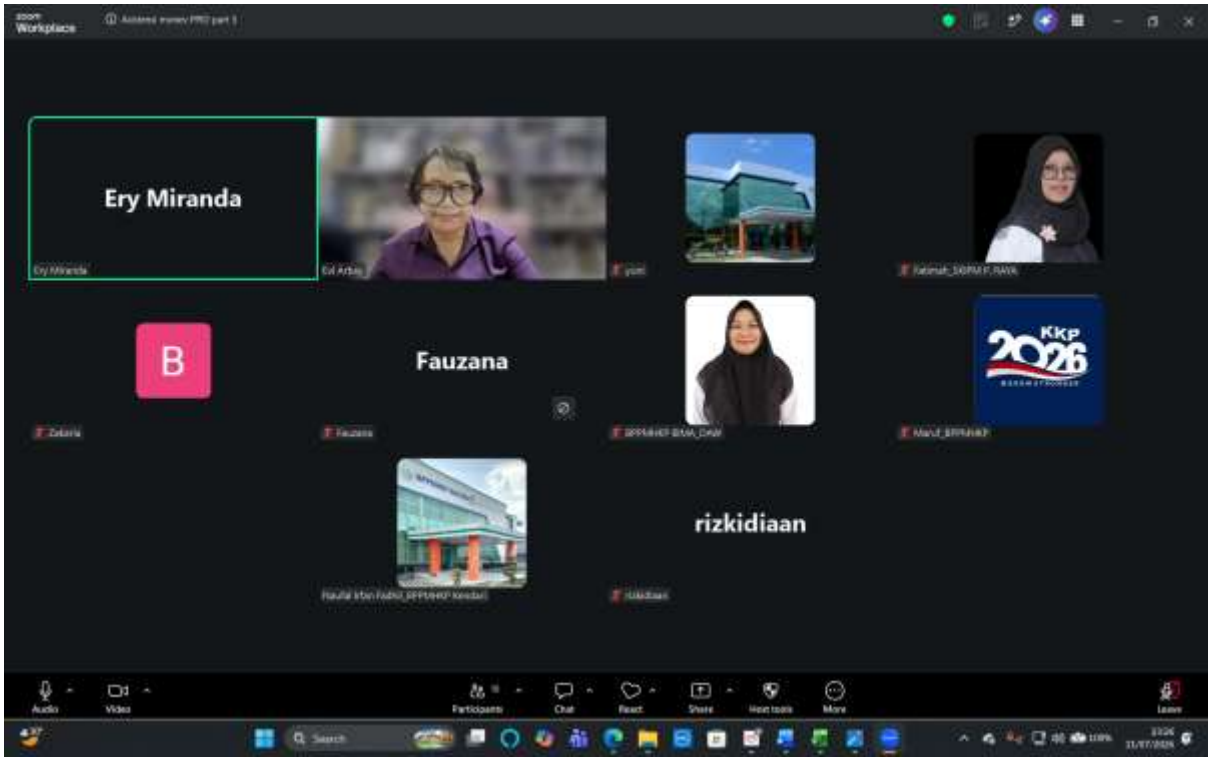
Ery Miranda
B
Fauzana
rizkidiaan

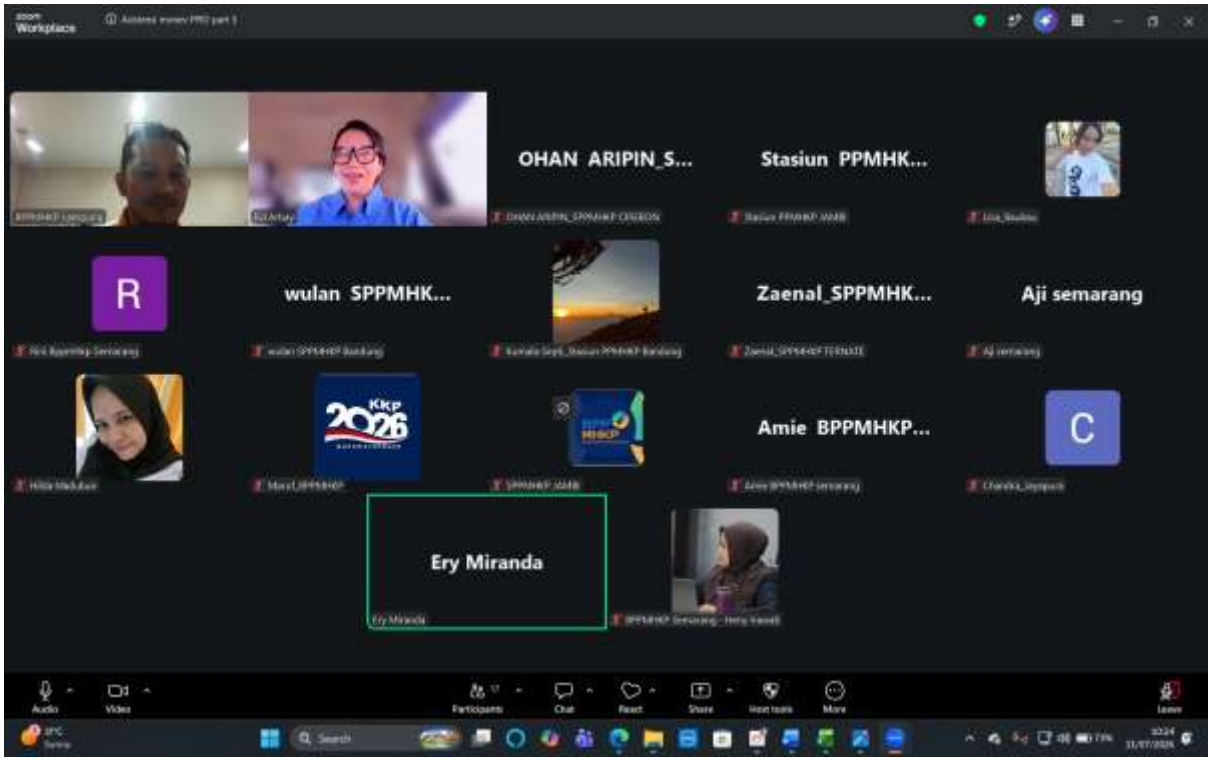
OHAN ARIPIN_S...
Stasiun PPMHK...
R
wulan SPPMHK...
Zaenal_SPPMHK...
Aji semarang
Amie BPPMHKP...
C
Ery Miranda

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

BPP MHKP

PEMBINAAN

PENGISIAN SAQ MONEV PPID 2026

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

LINGKUP BPPMHKP

BERSAMA WUJUDKAN

100% INFORMATIF

BPPMHKP TAHUN 2026

TRANSPARAN
MELAYANI DENGAN KETULUSAN

AKUNTABEL
BEKERJA DENGAN INTEGRITAS

PARTISIPATIF
BERKOLABORASI UNTUK NEGERI

PROFESIONAL
MUTU TERJAGA, KEPERCAYAAN MENINGKAT

SATU LANGKAH SERENTAK UNTUK PRESTASI GEMILANG

SELASA 23 JUNI 2026

09.00 WIB SELESAI

RUANG RAPAT CARPIO KECIL
GMB II LT.6, SEKRETARIAT BPPMHKP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA PUSAT

HYBRID
Zoom Meeting Application
Meeting ID : **431 463 0291**
Passcode : **PPID**

BUDAYA TERBUKA
Informasi untuk semua

DATA AKURAT DOKUMENTASI LENGKAP

LAYANAN CEPAT & MUDAH

KOLABORASI UNTUK HASIL TERBAIK

REPUTASI MELALUI TRANSPARANSI

TARGET 2026
100% INFORMATIF
DI SELURUH UNIT BPPMHKP

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#2C24 KKP BEYOND

BPPMHKP

bppmhkp.kkp.go.id

PPID BPPMHKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGUMUMAN RESMI
HASIL PENILAIAN I PPID BPPMHKP 2025

100% INFORMATIF TARGET 2026

MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Akselerasi Menuju 100% UPT Informatif 2026

"Dari Kepatuhan Menuju Budaya Keterbukaan Informasi Publik yang Unggul, Akuntabel & Berkelanjutan"

CAPAIAN PPID BPPMHKP TAHUN 2025

TOTAL UPT BPPMHKP	INFORMATIF (NILAI 90 – 100)	MENUJU INFORMATIF (NILAI 80 – 89,99)	CUKUP INFORMATIF (NILAI 60 – 79,99)
46 UPT	36 UPT	4 UPT	7 UPT
	78,26%	8,70%	15,22%

TINGKAT CAPAIAN 78,26% INFORMATIF (36 UPT)

Tersisa 21,74% (10 UPT) Menuju Target 100%

Ayo Berubah!

12 UPT CHAMPION
ROLE MODEL NASIONAL
REPLIKASI PRAKTIK BAIK

TOP CHAMPION NILAI 100

1	SKIPMHKP Aceh	100
2	BKIPMHKP Jakarta II	100
3	BKIPMHKP Balikpapan	100
4	BKIPMHKP Mataram	100
5	SKIPMHKP Sorong	100
6	BKIPMHKP Ambon	100
7	BKIPMHKP Tarakan	100
8	SKIPMHKP Ternate	100
9	SKIPMHKP Padang	100
10	SKIPMHKP Cirebon	100
11	SKIPMHKP Bandung	100
12	BKIPMHKP Banjarmasin	100

ESELON I BERPRESTASI

1

100

MENCAPAI NILAI 100 PADA KESEMPATAN PERTAMA

Sekretariat BPPMHKP
(PPID Pelaksana Eselon I)

CONTOH & ROLE MODEL KEUNGGULAN KETERBUKAAN INFORMASI

DAFTAR UPT INFORMATIF (NILAI 90 – 100)

No.	UNIT ORGANISASI	NILAI	No.	UNIT ORGANISASI	NILAI
13	SKIPMHKP Batam	99,90	24	SKIPMHKP Jambi	96,78
14	BKIPMHKP Surabaya I	99,70	25	SKIPMHKP Pangkal Pinang	95,82
15	SKIPMHKP Merak	99,60	26	BKIPMHKP Entikong	95,68
16	SKIPMHKP Merauke	99,11	27	SKIPMHKP Bau - Bau	95,58
17	BKIPMHKP Jayapura	98,85	28	BKIPMHKP Lampung	95,40
18	BBKIPMHKP Makassar	98,80	29	SKIPMHKP Palembang	95,10
19	SKIPMHKP Luwuk Banggai	98,50	30	SKIPMHKP Medan II	94,80
20	SKIPMHKP Yogyakarta	98,50	31	SKIPMHKP Pontianak	94,10
21	SKIPMHKP Bima	97,80	32	SKIPMHKP Mamuju	93,35
22	SKIPMHKP Bengkulu	97,30	32	BKIPMHKP Manado	93,13
23	SKIPMHKP Palangkaraya	96,93	34	Balai Uji Standar KIPM	93,05
			35	SKIPMHKP Gorontalo	92,60
			36	SKIPMHKP Kupang	91,60

SELAMAT! TERIMA KASIH ATAS KOMITMEN DAN KONSISTENSI DALAM MENJAGA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

MENUJU INFORMATIF (NILAI 80 – 89,99)

No.	UNIT ORGANISASI	NILAI
37	BKIPMHKP Semarang	89,80
38	BKIPMHKP Medan I	88,30
39	BKIPMHKP Surabaya II	84,62
40	SKIPMHKP Palu	83,65

AYO TINGKATKAN!
Lanjutkan perbaikan, lengkapi evidence, dan perkuat inovasi layanan informasi. Target Anda: INFORMATIF 2026!

CUKUP INFORMATIF (NILAI 60 – 79,99)

No.	UNIT ORGANISASI	NILAI
41	BKIPMHKP Denpasar	79,80
42	BKIPMHKP Tanjung Pinang	71,25
43	SKIPMHKP Pekanbaru	70,82
44	SKIPMHKP Kendari	67,41
45	BKIPMHKP Jakarta I	67,35
46	SKIPMHKP Tanjung Balai Asahan	62,87
47	SKIPMHKP Tahuna	62,10

PRIORITAS PERBAIKAN NASIONAL!
Lakukan percepatan perbaikan dengan pendampingan intensif dan aksi nyata. Kita bisa berubah menjadi lebih baik!

ANALISIS CAPAIAN 2025

KEKUATAN KITA
- 36 UPT (78,26%) telah mencapai kategori Informatif.
- 12 UPT memperoleh Nilai 100 (Sempurna).
- Seluruh wilayah Indonesia telah memiliki Champion PPID.
- Terbentuk jejaring mentor nasional dan replikasi praktik baik mulai berjalan.

AREA PERBAIKAN
- Masih terdapat 4 UPT menuju Informatif dan 7 UPT Cukup Informatif.
- Perlunya penguatan komitmen, kualitas layanan, dan kelengkapan evidence.
- Pendampingan berbasis risiko menjadi kunci percepatan 2026.

FOKUS PRIORITAS 2026

01 **4 UPT MENUJU INFORMATIF**
Pendampingan & Coaching Clinic

02 **7 UPT CUKUP INFORMATIF**
Pendampingan Intensif & Monitoring

03 **100% UPT INFORMATIF**
Replikasi, Inovasi & Kolaborasi

TARGET 2026

46 UPT
100% INFORMATIF

BERSAMA KITA WUJUDKAN!
TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN MELAYANI SEPENUH HATI

KOMITMEN BERSAMA

- Bergerak Bersama
- Berbagi Praktik Baik
- Mengawal Perubahan
- Menuju 100% Informatif 2026!

SETIAP LANGKAH KECIL HARI INI, ADALAH PERUBAHAN BESAR UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI MASA DEPAN!

BERGERAK BERSAMA • BERBAGI PRAKTIK BAIK • MENGAWAL PERUBAHAN • MENUJU 100% INFORMATIF 2026!

KETERBUKAAN INFORMASI ADALAH KEKUATAN KEPERCAYAAN PUBLIK!"

PPID BPPMHKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

CAPAIAN PPID BADAN MUTU 2025

AKSELERASI MENUJU 100% UPT BERPREDIKAT INFORMATIF 2026

Dari Kepatuhan Menuju Budaya Keterbukaan Informasi Publik

100% INFORMATIF TARGET 2026

RINGKASAN CAPAIAN 2025

TOTAL UPT BPPMHKP	UPT BERPREDIKAT INFORMATIF (NILAI 90 – 100)	PRIORITAS PENINGKATAN (NILAI 80 – 89,99)	SUPER PRIORITAS (NILAI < 80)
46 UPT	36 UPT	4 UPT	6 UPT
	78,26%	8,70%	13,04%

TARGET AKHIR 2026 **46 UPT** — **100%** BERPREDIKAT INFORMATIF

STATISTIK CAPAIAN NASIONAL 2025

78,26% TELAH INFORMATIF (36 UPT)

TERSISA 21,74% (10 UPT) MENUJU TARGET 100%

TREND PENINGKATAN CAPAIAN INFORMATIF BADAN MUTU

2022	2023 (16 UPT)	2024 (28 UPT)	2025 (36 UPT)	(46 UPT)
34,78%	47,83%	60,87%	78,26%	100%

" Konsistensi hari ini, 100% Informatif esok hari! "

12 CHAMPION NILAI 100 (INFORMATIF)

12 UPT MERAIH NILAI 100
Sebagai Champion Nasional Replikasi Praktik Baik

1. SKIPMHKP Aceh
2. BKIPMHKP Jakarta II
3. BKIPMHKP Balikpapan
4. BKIPMHKP Mataram
5. SKIPMHKP Sorong
6. BKIPMHKP Ambon
7. BKI'PMHKP Tarakan
8. BKI'PMHKP Banjarbaru
9. SKI'PMHKP Padang
10. SKI'PMHKP Cirebon
11. SKI'PMHKP Bandung
12. SKI'PMHKP Ternate

TERIMA KASIH KEPADA SELURUH CHAMPION
Penggerak Perubahan dan Inspirasi Nasional

CAPAIAN STRATEGIS 2025

- 36 UPT TELAH MEMENUHI STANDAR NASIONAL KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
- SELURUH WILAYAH INDONESIA TELAH MEMILIKI CHAMPION PPID
- TERBENTUK JEJARING MENTOR NASIONAL
- REPLIKASI PRAKTIK BAIK MULAI DITERAPKAN SECARA NASIONAL
- PENDAMPINGAN BERBASIS RISIKO MULAI DIMPLEMENTASIKAN

PETA RISIKO MENUJU 100% INFORMATIF 2026

RISIKO RENDAH — 36 UPT
FOKUS :
- Menjaga Konsistensi
- Berbagi Praktik Baik
- Menjadi Mentor Nasional

RISIKO SEDANG — 4 UPT
FOKUS :
- Perbaikan Evidence
- Optimalisasi Website
- Finalisasi SAQ

RISIKO TINGGI — 6 UPT
FOKUS :
- Pendampingan Intensif
- Monitoring Harian
- Coaching Clinic
- Pendampingan Mentor Nasional

STRATEGI 2026

OPERATION 10
10 UPT
DIAKSELERASI MENUJU PREDIKAT INFORMATIF

- MENTORING CHAMPION
- COACHING CLINIC
- REPLIKASI PRAKTIK BAIK
- MONITORING BERBASIS RISIKO
- PENDAMPINGAN HARIAN

KPI 2026

Total UPT	46 UPT
Sudah Informatif	36 UPT (78,26%)
Fokus Pendampingan	10 UPT (21,74%)

Target Akhir 2026
46 UPT
100% INFORMATIF

CATATAN PENTING & RENCANA AKSI 2026

1. PENGUATAN KOMITMEN
- Memperkuat komitmen pimpinan dalam keterbukaan informasi publik di seluruh UPT.
- Integrasikan keterbukaan informasi dalam budaya kerja dan kinerja.

2. OPTIMALISASI LAYANAN
- Tingkatkan kualitas dan kelengkapan informasi pada website PPID.
- Pastikan informasi mudah diakses, akurat, mutakhir, dan bermanfaat.

3. PENGUATAN EVIDENCE & SAQ
- Lengkapi dan validasi evidence sesuai indikator SAQ.
- Lakukan review berkala sebelum penilaian nasional.

4. PENDAMPINGAN BERBASIS RISIKO
- Prioritaskan pendampingan intensif bagi 10 UPT yang masih perlu peningkatan.
- Lakukan monitoring harian dan coaching clinic tematik.

5. REPLIKASI & BERBAGI PRAKTIK BAIK
- Champion berbagi praktik baik kepada UPT lainnya.
- Bangun komunitas PPID yang solid dan kolaboratif.

6. EVALUASI & INOVASI
- Lakukan evaluasi rutin untuk perbaikan berkelanjutan.
- Berinovasi dalam layanan informasi publik berbasis teknologi.

BERGERAK BERSAMA ▸ BERBAGI PRAKTIK BAIK ▸ MENGAWAL PERUBAHAN ▸ MENUJU 100% INFORMATIF!

KETERBUKAAN INFORMASI ADALAH KEKUATAN KEPERCAYAAN PUBLIK!

PPID BPPMHKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PEMBAGIAN KLASTER AKSELERASI NASIONAL
100% UPT BPPMHKP INFORMATIF 2026

PENDEKATAN HYBRID : WILAYAH TETAP ADA, PENDAMPINGAN BERDASARKAN RISIKO!

100% INFORMATIF TARGET 2026

KLASTER 1 — 11 UPT SUPER PRIORITAS
AKSELERASI 11 UPT MENUJU INFORMATIF

MENTOR NASIONAL

- BKI PPMHKP BALIKPAPAN (100)
- BKI PPMHKP MATARAM (100)

PERAN MENTOR

- Bedah Indikator SAQ
- Identifikasi Gap Nilai
- Kelompokkan DIP & DIK
- Informasi Berkala & Serta Merta
- Kelengkapan Eviden Pendukung
- Optimalisasi Website PPID
- Coaching & Monitoring Intensif

UPT YANG DIBINA (11 UPT)

NO	NAMA UPT	NILAI
1	SKIPPMHKP Tahuna	62,10
2	SKIPPMHKP Tanjung Balai Asahan	62,87
3	SKIPPMHKP Pekanbaru	70,82
4	SKIPPMHKP Kendari	67,41
5	SKIPPMHKP Tanjung Pinang	71,25
6	BKIPPMHKP Denpasar	79,80
7	SKIPPMHKP Palu	83,65
8	BKIPPMHKP Surabaya II	84,62
9	BKIPPMHKP Medan I	88,30
11	BKIPPMHKP Semarang	89,80

* Nilai berdasarkan hasil Monev KIP KKP Tahun 2024

KLASTER 2 — 35 UPT INFORMATIF
PENGAWALAN & REPLIKASI PRAKTIK BAIK

MENTOR & UPT YANG DIBINA BERDASARKAN WILAYAH

WILAYAH I SUMATERA

MENTOR:
- SKI PPMHKP Aceh (100)
- SKI PPMHKP Padang (100)

UPT YANG DIBINA (6 UPT):

1	SKI PPMHKP Medan 2	(94,80)
2	SKI PPMHKP Bengkulu	(97,30)
3	SKI PPMHKP Jambi	(96,78)
4	SKI PPMHKP Pangkal Pinang	(95,82)
5	BKI PPMHKP Palembang	(95,10)
6	SKI PPMHKP Batam	(99,90)

(Total 6 UPT)

WILAYAH II JAWA – BALI

MENTOR:
- BKI PPMHKP Jakarta 2 (100)
- SKI PPMHKP Cirebon (100)

UPT YANG DIBINA (6 UPT):

1	BKI PPMHKP Surabaya I	(99,70)
2	SKI PPMHKP Jogjakarta	(98,60)
3	SKI PPMHKP Merak	(99,60)
4	Balai Uji Standar PPMHKP	(93,05)
5	SKI PPMHKP Bandung	100)
6	SKI PPMHKP Lampung	(95,40)

(Total 6 UPT)

WILAYAH III KALIMANTAN – NUSA TENGGARA

MENTOR:
- BKI PPMHKP Tarakan (100)
- BKI PPMHKP Banjarbaru (100)

UPT YANG DIBINA (5 UPT):

1	BKI PPMHKP Entikong	(95,68)
2	SKI PPMHKP Pontianak	(94,10)
3	SKI PPMHKP Palangkaraya	(96,93)
4	SKI PPMHKP Kupang	(91,60)
5	SKI PPMHKP Bima	(97,80)

(Total 5 UPT)

WILAYAH IV SULAWESI – PAPUA

MENTOR:
- BKI PPMHKP Ambon (100)
- BKI PPMHKP Sorong (100)
- SKI PPMHKP Ternate (100)

UPT YANG DIBINA (8 UPT):

1	BKI PPMHKP Menado	(93,13)
2	SKI PPMHKP Gorontalo	(92,60)
3	BBKI PPMHKP Makassar	(98,80)
4	SKI PPMHKP Mamuju	(93,35)
5	SKIPM Bau-Bau	(95,58)
6	SKI PPMHKP Luwuk Banggai	(98,50)
7	BKI PPMHKP Jayapura	(98,85)
8	SKI PPMHKP Merauke	(99,11)

(Total 8 UPT)

PERAN UTAMA KLASTER 2

- Menjadi Role Model
- Berbagi Praktik Baik
- Pendampingan Sesama UPT
- Penguatan Inovasi & Layanan
- Menjaga Konsistensi & Kualitas

JADWAL PENTING AKSELERASI 100% UPT BPPMHKP INFORMATIF 2026

1 PEMBINAAN NASIONAL LINGKUP BADAN MUTU
Selasa, 23 Juni 2026
- Penyamaan Persepsi
- Strategi & Arah Kebijakan
- Penguatan Komitmen
- Pembagian Klaster & Mentor

2 PEMBINAAN KLASTER 1
Kamis, 25 Juni 2026
- Coaching & Bedah SAQ
- Identifikasi Gap Nilai
- Penyusunan Rencana Perbaikan
- Pendampingan Intensif

3 PEMBINAAN KLASTER 2
Jum'at, 26 Juni 2026
- Replikasi Praktik Baik
- Penguatan Evidence
- Optimalisasi Website PPID
- Sharing Best Practice

4 PENGERJAAN SAQ SECARA MANDIRI
27 – 29 Juni 2026
- Penyusunan SAQ
- Kelengkapan Evidence
- Penyempurnaan Website
- Validasi Dokumen

5 PENILAIAN PENDAHULUAN LINGKUP BADAN MUTU UNTUK PARA MENTOR
29 – 30 Juni 2026
- Review SAQ
- Koreksi Evidence
- Catatan Perbaikan
- Konsolidasi Hasil

6 PENILAIAN PENDAHULUAN MANDIRI KLASTER 1 & 2
1 – 4 Juli 2026
- Finalisasi SAQ
- Penyempurnaan Evidence
- Simulasi Penilaian
- Persiapan Submit

7 FINAL SUBMIT PELIKAN
Minggu, 5 Juli 2026 Jam 12.00 WIB
- Seluruh SAQ selesai
- Evidence lengkap
- Submit melalui aplikasi PELIKAN

8 PENILAIAN NASIONAL LINGKUP KKP
7 – 10 Juli 2026
Bandung
- Hanya diwakili oleh Eselon I (PPID Pelaksana)
- Presentasi Nasional
- Verifikasi & Penilaian Akhir

BERGERAK BERSAMA ▸ BERBAGI PRAKTIK BAIK ▸ MENGAWAL PERUBAHAN ▸ MENUJU 100% BPPMHKP INFORMATIF!

PPID BPPMHKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

AKSELERASI NASIONAL
100% UPT BPPMHKP INFORMATIF 2026

36 UPT TELAH INFORMATIF (78,26%) | 10 UPT MENJADI FOKUS AKSELERASI NASIONAL

PENDEKATAN HYBRID : WILAYAH TETAP ADA, PENDAMPINGAN BERDASARKAN RISIKO!

100% INFORMATIF TARGET 2026

KLASTER 1 — SATGAS SUPER PRIORITAS
AKSELERASI 11 UPT MENUJU INFORMATIF

JUMLAH UPT
11 UPT

TARGET
MINIMAL **NILAI 90** (INFORMATIF)

UPT DENGAN NILAI < 90

NO	NAMA UPT	NILAI
1	SKIPPMHKP Tahuna	62,10
2	SKIPPMHKP Tanjung Balai Asahan	62,87
3	SKIPPMHKP Pekanbaru	70,82
4	SKIPPMHKP Kendari	67,41
5	SKIPPMHKP Tanjung Pinang	71,25
6	BKIPPMHKP Denpasar	79,80
7	SKIPPMHKP Palu	83,65
8	BKIPPMHKP Surabaya II	84,62
9	BKIPPMHKP Medan I	88,30
10	BKIPPMHKP Semarang	89,80

MENTOR NASIONAL
- BKI PPMHKP BALIKPAPAN (100)
- BKI PPMHKP MATARAM (100)

FOKUS PEMBINAAN SAQ MONEV
- Bedah Indikator SAQ
- Identifikasi Gap Nilai
- Kelompokkan DIP & DIK
- Informasi Berkala & Serta Merta
- Kelengkapan Eviden Pendukung
- Optimalisasi Website PPID
- Coaching & Monitoring Intensif

OPERATION 11 : AKSELERASI 11 UPT MENUJU INFORMATIF

PPID BPPMHKP ESELON I
NILAI 100
INFORMATIF

ROLE MODEL
LEADERSHIP
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KLASTER 2 — SATGAS PENGAWALAN & REPLIKASI PRAKTIK BAIK
MEMPERTAHANKAN 36 UPT INFORMATIF & MENJADI PENGGERAK PERUBAHAN

JUMLAH UPT
36 UPT INFORMATIF

TARGET
MEMPERTAHANKAN NILAI ≥ 90 & MENJADI PENGGERAK REPLIKASI PRAKTIK BAIK NASIONAL

DIBAGI MENJADI 4 WILAYAH – MENTOR & UPT YANG DIBINA (MINIMAL 6 UPT PER WILAYAH)

WILAYAH I SUMATERA
MENTOR:
- SKI PPMHKP Aceh (100)
- SKI PPMHKP Padang (100)

UPT YANG DIBINA (6 UPT):
1. SKI PPMHKP Medan 2 (94,80)
2. SKI PPMHKP Bengkulu (97,30)
3. SKI PPMHKP Jambi (96,78)
4. SKI PPMHKP Pangkal Pinang (95,82)
5. BKI PPMHKP Palembang (95,10)
6. SKI PPMHKP Batam (99,90)

(Total 6 UPT)

WILAYAH II JAWA – BALI
MENTOR:
- BKI PPMHKP Jakarta 2 (100)
- SKI PPMHKP Cirebon (100)

UPT YANG DIBINA (6 UPT):
1. BKI PPMHKP Surabaya I (99,70)
2. SKI PPMHKP Jogjakarta (98,60)
3. SKI PPMHKP Merak (99,60)
4. Balai Uji Standar PPMHKP (93,05)
5. SKI PPMHKP Bandung (100)
6. SKI PPMHKP Lampung (95,40)

(Total 6 UPT)

WILAYAH III KALIMANTAN – NUSA TENGGARA
MENTOR:
- BKI PPMHKP Tarakan (100)
- BKI PPMHKP Banjarbaru (100)

UPT YANG DIBINA (6 UPT):
1. BKI PPMHKP Entikong (95,68)
2. SKI PPMHKP Pontianak (94,10)
3. SKI PPMHKP Palangkaraya (96,93)
4. SKI PPMHKP Kupang (91,60)
5. SKI PPMHKP Bima (97,80)

(Total 5 UPT)

WILAYAH IV SULAWESI – PAPUA
MENTOR:
- BKI PPMHKP Ambon (100)
- BKI PPMHKP Sorong (100)
- SKI PPMHKP Ternate (100)

UPT YANG DIBINA (8 UPT):
1. BKI PPMHKP Menado (93,13)
2. SKI PPMHKP Gorontalo (92,60)
3. BBKI PPMHKP Makassar (98,80)
4. SKI PPMHKP Mamuju (93,35)
5. SKIPM Bau-Bau (95,58)
6. SKI PPMHKP Luwuk Banggai (98,50)
7. BKI PPMHKP Jayapura (98,85)
8. SKI PPMHKP Merauke (99,11)

(Total 8 UPT)

PERAN UTAMA KLASTER 2
- Menjadi Role Model
- Berbagi Praktik Baik
- Pendampingan Sesama UPT
- Penguatan Inovasi & Layanan
- Menjaga Konsistensi & Kualitas

FASE 1 — PERSIAPAN MENTOR
23-24 JUNI 2026

AGENDA UTAMA:
- Penyamaan Persepsi Indikator SAQ Monev
- Identifikasi Kelemahan UPT Binaan
- Penyusunan Strategi & Materi Pembinaan
- Pembagian Tugas Mentor Wilayah
- Persiapan Tools & Template Nasional

PESERTA: 10 MENTOR CHAMPION & TIM PPID BPPMHKP PUSAT

FASE 2 — PEMBINAAN HYBRID KLASTER SUPER PRIORITAS
25 JUNI 2026
09.00 – 12.00 WIB

AGENDA UTAMA:
- Coaching Clinic Pengisian SAQ Monev
- Bedah Indikator & Gap Nilai
- Workshop Kelengkapan DIP, DIK, Eviden Eviden Pendukung
- Optimalisasi Website & Informasi Publik
- Penyusunan Rencana Perbaikan 14 Hari

PESERTA: 11 UPT SUPER PRIORITAS
MENTOR: BKI PPMHKP BALIKPAPAN & BKI PPMHKP MATARAM

FASE 3 — PEMBINAAN HYBRID KLASTER PENGAWALAN & REPLIKASI PRAKTIK BAIK
26 JUNI 2026
09.00 – 12.00 WIB

AGENDA UTAMA:
- Penguatan & Simulasi Pengisian SAQ
- Sharing Best Practice & Inovasi
- Penyelarasan Eviden & Standardisasi
- Optimalisasi Website PPID
- Identifikasi Kebutuhan Pendampingan

PESERTA: 35 UPT INFORMATIF
MENTOR: 8 MENTOR WILAYAH

FASE 4 — MASA PERBAIKAN & PENDAMPINGAN INTENSIF
26 JUNI – 4 JULI 2026
DURASI 14 HARI

AGENDA UTAMA:
- Pendampingan Mentor Wilayah
- Klinik SAQ Harian (Online)
- Monitoring & Review Eviden
- Coaching via WA/Zoom/Call
- Perbaikan & Pemenuhan Kekurangan

MONITORING HARIAN OLEH TIM PPID BPPMHKP PUSAT

FASE 5 — REVIEW AKHIR SAQ
4 JULI 2026

BATAS AKHIR PENYAMPAIAN SAQ
5 JULI 2026
MAKSIMAL 12.00 WIB

RINGKASAN NASIONAL 2026

TOTAL UPT BPPMHKP **46 UPT**

INFORMATIF (90 – 100)	PRIORITAS PENINGKATAN (80 – 89,99)	SUPER PRIORITAS (60 – 79,99)
36 UPT (78,26%)	4 UPT (8,70%)	6 UPT (13,04%)

KPI NASIONAL 2026	STATUS
Target Nasional	46 UPT
Sudah Informatif	36 UPT
Belum Informatif	10 UPT
Persentase Capaian	78,26%
Target Akhir	100%

TARGET AKHIR 2026
46 UPT BPPMHKP 100% INFORMATIF

PROGRES CAPAIAN SAAT INI **78,26%** TERCAPAI

BERGERAK BERSAMA ▸ BERBAGI PRAKTIK BAIK ▸ MENGAWAL PERUBAHAN ▸ MENUJU 100% INFORMATIF!

TIDAK ADA UPT YANG TERTINGGAL
BERSAMA KITA WUJUDKAN PPID BPPMHKP YANG TERBUKA, AKUNTABEL, DAN TERPERCAYA.